

# PENGADILAN AGAMA MAUMERE



## *Laporan Pelaksanaan Kegiatan* Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020

Jln. Diponegoro Wolomarang Maumere

Telp. (0382) 21134/23514

Website : [pa-maumere.go.id](http://pa-maumere.go.id) | Email : [pa.maumere@gmail.com](mailto:pa.maumere@gmail.com)

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020 dapat kami susun dan kami sampaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Penggunaan sistem TI (Teknologi Informasi) yang semakin pesat membuat peningkatan bentuk-bentuk penyajian pelaporan dinamis dan akuntabel atas gambaran kinerja yang telah dilakukan.

Dalam laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kabupaten Sikka.

Laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok serta kegiatan selama tahun 2020 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Demi peningkatan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan di tahun yang akan datang, segala saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat kami harapkan.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

Wassalam,  
Maumere, 20 Januari 2021

Ketua,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730804 200112 1 003

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I   Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II   A.   Keadaan Perkaradi Peradilan Agama.....</b>	<b>19</b>
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	19
- Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	22
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	23
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	23
<b>B.   Penyelesaian Perkara.....</b>	<b>24</b>
- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus .....	25
- Jumlah Perkara Yang Putus Tepat Waktu .....	26
- Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK .....	28
- Jumlah Perkara Yang Berhasil di Mediasi.....	28
<b>C.   Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)...</b>	<b>28</b>
- Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	30
- Sidang Keliling .....	30
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) .....	32
<b>BAB III   Sumber Daya Manusia .....</b>	<b>34</b>
Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Kepangkatan, Golongan dan Pendidikan .....	34
- Mutasi .....	45
- Promosi .....	47
- Pensiun .....	47
- Diklat Teknis dan Non Teknis .....	48

<b>BAB IV</b>	<b>Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana, Dan Teknologi Informasi.....</b>	<b>49</b>
	A. Pengelolaan Keuangan .....	49
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	54
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi Terkait SIPP.....	61
	- Implementasi <i>E-Court</i> .....	61
	- Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).....	63
<b>BAB V</b>	<b>Pelayanan Publik yang Prima .....</b>	<b>67</b>
	- Akreditasi Penjaminan Mutu.....	67
	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	74
	- Inovasi Pelayanan Publik.....	76
<b>BAB VI</b>	<b>Pengawasan .....</b>	<b>85</b>
	A. Internal .....	85
	B. Evaluasi .....	90
<b>BAB VII</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>93</b>
	A. Kesimpulan .....	93
	B. Rekomendasi .....	95
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>97</b>
	1. SK. Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020.....	97
	2. Foto-foto Kegiatan Pengadilan Agama Maumere tahun 2020..	100

## BAB I

PENGANTAR  
PENDAHULUAN

## - Kebijakan Umum Peradilan

Gambar. 1. Foto Gedung Kantor PA. Maumere



Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang kekuasaan kehakiman, sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan sebagai tindak lanjut dari penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dimasyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan lahirlah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya berada dibawah

kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut untuk peradilan agama lahirlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Gerakan pembaharuan peradilan selalu ditingkatkan dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya, segala inovasi dicanangkanguna memenuhi peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dimulai dengan ditetapkannya *Blue Print* (Cetak Biru) 2010-2035, Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, Road Map Penerapan Cetak Biru, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Court*) dengan komponen pendaftaran (*E-Filing*), pembayaran (*E-Payment*), Pemanggilan (*E-Summon*), Biaya Prodeo, biaya Sidang Keliling dan *E-Litigasi* serta audio pencegahan gratifikasi yang wajib setiap hari dibacakan, hal ini merupakan terobosan baru guna menyongsong Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya menuju era baru peradilan modern berbasis Teknologi Informasi (TI).

Bukan hanya Mahkamah Agung RI yang berupaya melakukan terobosan dan pembaharuan yang terus menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pencari keadilan, Badan Peradilan Agama juga mengeluarkan 11 (sebelas) aplikasi unggulan guna mendukung secara maksimal program kerja Mahkamah Agung RI. Adapun 9 aplikasi yang di maksud yaitu :

1. Aplikasi antrian sidang;
2. Aplikasi notifikasi perkara;
3. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan;
4. Aplikasi E-Register;

5. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan;
6. Aplikasi E-Keuangan;
7. CommandCenter;
8. Aplikasi E-Examinasi;
9. Aplikasi PNBP Fungsional;
10. Aplikasi Validasi Akta Cerai;
11. Aplikasi Gugatan Mandiri.

Pengadilan Agama Maumere, sebagai pengadilan Tingkat Pertama (*Judexfacti*) merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sejak saat itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu, Memeriksa, Memutus dan menyelesaikan setiap perkara-perkara ditingkat pertamanya antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Merespon program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilag berdasarkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Maumere, program-program tersebut diatas walaupun dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia, administrasi, finansial, Sarana dan prasarana tetapi Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan seluruh program tersebut baik Program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI maupun 11 (sebelas) aplikasi unggulan Dirjen Badan Peradilan Agama dengan prinsip pelayanan 3S (Senyum, Salam, Sapa), dan 5R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin*) demi memenuhi kebutuhan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Walaupun dalam pelaksanaannya belum secara optimal karena masih terdapat kendala-kendala dalam implementasi aplikasi tersebut, seperti aplikasi PNBP *On-line* yang secara realitasnya masih terdapat beberapa konten dalam aplikasi tersebut belum

lengkapsesuai kebutuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga kami sangat mengharapkan kepada tim pengembangan aplikasi pada instansi Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan Agama untuk segera membenahi kekurangan-kekurangan dalam optimalisasi aplikasi yang telah dirilis guna lebih memaksimalkan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu Pengadilan yang melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dulunya SAPM di Tahun 2018 dan telah mendapatkan nilai dengan predikat A “*Excellent*”, Pengadilan Agama Maumere juga pada Tanggal 19 s.d. 20Oktober Tahun 2020 telah menyelesaikan *Assesmen Surveillance* I oleh Asessor eksternal, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 Tanggal 30 November 2020 perihal Hasil Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020, dengan ucapan rasa syukur yang tak terhingga karena Pengadilan Agama Maumere dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai sebelumnya dengan predikat A “*Excellent*”, capaian ini tidak lain dari sebuah wujud komitmen dan kebersamaan dengan nilai-nilai kekeluargaan dari seluruh aparatur dalam mewujudkan implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Maumere, tak berhenti sampai disitu Pengadilan Agama Maumere di tahun 2020 juga mendapatkan penghargaan pelaksanaan kinerja yaitu Keberhasilan mencapai Peringkat ke-2 dalam penilaian kinerja satuan kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun 2020, yang penghargaannya di berikan oleh PTA Kupang yang diserahkan tanggal 17 Februari 2020;

Gambar 2. Foto Penyerahan Piagam Penghargaan Peringkat ke 2 Penilaian Kinerja



Pengadilan Agama Maumere tak pernah surut dalam berbenah diri baik dalam hal peningkatan kualitas kinerja, memberikan pelayanan secara internal maupun dalam pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan,Sebagai tindaklanjut dari sebuah pembaharuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Maumere berdasarkan kompetensi tugas dan wewenang juga telah melaksanakan dan mengimplementasikan 6 (enam) area perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari :

1. Manajemen Perubahan (pola pikir dan budaya kerja)
2. Penataan Tata Laksana;
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Penguatan Pengawasan;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pengadilan Agama Maumere berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan berpuncak padaMahkamah Agung Republik Indonesia.Pengadilan Agama Maumere berkedudukandi Kota Maumeredengan letak geografis antara 806'36"LS – 8048'0"LS dan 121040'12"BT – 122041'24"BT yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan wilayah hukumterdiri dari 21 Kecamatan dan 160 Kelurahan/Desa yang tersebar sebagaimana berikut :

**Tabel .1.Daftar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020**

No	Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Radius	Jarak (Km)
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kecamatan Alok</b>		
	1 Kel. Kota Uneng	I	0 – 20 Km
	2 Kel. Nagalimang	I	0 – 20 Km
	3 Kel. Madawat	I	0 – 20 Km
	4 Kel. Kabor	I	0 – 20 Km
	5 Desa Pemanan	Antar PulauI	-
	6 DesaGunung Sari	Antar PulauI	-
	7 Desa Samparong	Antar PulauIV	-
<b>2</b>	<b>Kecamatan Alok Timur</b>		
	1 Kel Waioti	I	0 – 20 Km

	2	Kel. Kota Baru	I	0 – 20 Km
	3	Kel. Beru	I	0 – 20 Km
	4	Kel. Wairotang	I	0 – 20 Km
	5	Kel. Nangameting	I	0 – 20 Km
	6	Desa Lepolima	Antar Pulau V	-
	7	Desa Watugong	II	-
	8	Desa Kojadoi	Antar Pulau III	-
	9	Desa Kojagete	Antar Pulau III	-
	10	Desa Parumaan	Antar Pulau II	-
<b>3</b>	<b>Kecamatan Alok Barat</b>			
	1	Kel. Wuring	I	0 – 20 Km
	2	Kel. Hewuli	I	0 – 20 Km
	3	Kel. Wailiti	I	0 – 20 Km
	4	Kel. Wolomarang	I	0 – 20 Km
<b>4</b>	<b>Kecamatan Nita</b>			
	1	Desa Tilang	I	0 – 20 Km
	2	Desa Lusitada	I	0 – 20 Km
	3	Desa Bloro	I	0 – 20 Km
	4	Desa Tebuk	I	0 – 20 Km
	5	Desa Nita	I	0 – 20 Km
	6	Desa Takaplager	II	20 – 40 Km
	7	Desa Nitaloang	II	20 – 40 Km
	8	Desa Wuliwutik	II	20 – 40 Km
	9	Desa Ladogahar	II	20 – 40 Km
	10	Desa Riit	II	20 – 40 Km
	11	Desa Nirangkuling	II	20 – 40 Km
	12	Desa Maheboro	II	20 – 40 Km
<b>5</b>	<b>Kecamatan Lela</b>			
	1	Desa Kolidetung	II	20 – 40 Km
	2	Desa korowuwu	II	20 – 40 Km
	3	Desa Hepang	II	20 – 40 Km
	4	Desa Lela	II	20 – 40 Km
	5	Desa Watutedang	II	20 – 40 Km
	6	Desa Sikka	II	20 – 40 Km
	7	Desa Ligai	II	20 – 40 Km
	8	Desa Baopaat	II	20 – 40 Km
	9	Desa Du	II	20 – 40 Km
<b>6</b>	<b>Kecamatan Kewapante</b>			
	1	Desa Umagera	II	20 – 40 Km
	2	Desa Lantena	II	20 – 40 Km

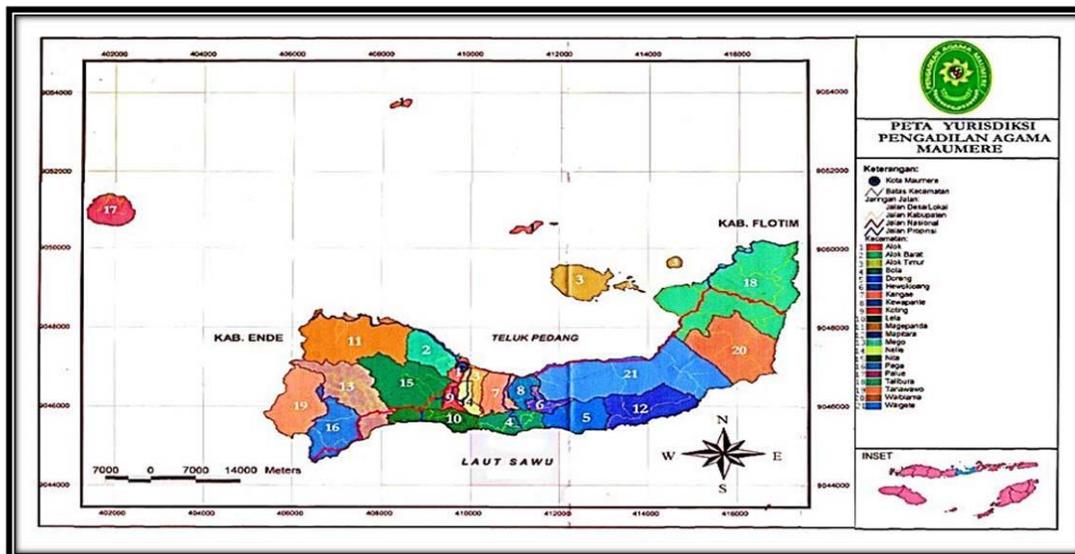
	3	Desa Kopong	II	20 – 40 Km
	4	Desa Seusina	II	20 – 40 Km
	5	Desa Namangkewa	II	20 – 40 Km
	6	Desa Waiera	II	20 – 40 Km
	7	Desa Geliting	II	20 – 40 Km
	8	Desa Wairkoja	II	20 – 40 Km
<b>7</b>	<b>Kecamatan Bola</b>			
	1	Desa Hokor	III	40 – 60 Km
	2	Desa Wolonwalu	III	40 – 60 Km
	3	Desa Wolokoli	III	40 – 60 Km
	4	Desa Bolo	III	40 – 60 Km
	5	Desa Umuta	III	40 – 60 Km
	6	Desa ipir	III	40 – 60 Km
<b>8</b>	<b>Kecamatan Waigete</b>			
	1	Desa Pogon	II	20 – 40 Km
	2	Desa Aiburua	II	20 – 40 Km
	3	Desa Wairbleler	II	20 – 40 Km
	4	Desa Hoder	II	20 – 40 Km
	5	Desa Egon	II	20 – 40 Km
	6	Desa Nangatobong	II	20 – 40 Km
	7	Desa Waieterang	II	20 – 40 Km
	8	Desa Watudiran	II	20 – 40 Km
	9	Desa Rumut	II	20 – 40 Km
<b>9</b>	<b>Kecamatan Talibura</b>			
	1	Desa Talibura	Daerah SulitI	-
	2	Desa Darat Gunung	Daerah Sulit I	-
	3	Desa Darat Pantai	Daerah Sulit I	-
	4	Desa Nebe	Daerah Sulit I	-
	5	Desa Hikong	Daerah SulitI	-
	6	Desa Kringa	Daerah Sulit I	-
	7	Desa Ojang	Daerah Sulit I	-
	8	Desa Wailamung	Daerah Sulit I	-
	9	Desa Lewomodo	Daerah SulitI	-
	10	Desa Timutawa	Daerah Sulit I	-
	11	Desa Bangko'or	Daerah Sulit I	-
	12	Desa Nangahale	Daerah SulitI	-
<b>10</b>	<b>Kecamatan Nele</b>			
	1	Desa Nelle Wutung	I	0 – 20 Km
	2	Desa Nelle Lorang	I	0 – 20 Km
	3	Desa Manuburu	I	0 – 20 Km

	4	Desa Nelee Barat	I	0 – 20 Km
	5	Desa Nelle Urung	I	0 – 20 Km
<b>11</b>	<b>Kecamatan Magepanda</b>			
	1	Desa Kolisia A	II	20 – 40 Km
	2	Desa Magepanda	II	20 – 40 Km
	3	Desa Reroroja	II	20 – 40 Km
	4	Desa Kolisia B	II	20 – 40 Km
	5	Desa Done	II	20 – 40 Km
<b>12</b>	<b>Kecamatan Koting</b>			
	1	Desa Koting A	I	0 – 20 Km
	2	Desa Koting B	I	0 – 20 Km
	3	Desa Koting C	I	0 – 20 Km
	4	Desa Koting D	I	0 – 20 Km
	5	Desa Paubekor	I	0 – 20 Km
	6	Desa Ribang	I	0 – 20 Km
<b>13</b>	<b>Kecamatan Hewokloang</b>			
	1	Desa Hewopkloang	II	20 – 40 Km
	2	Desa Hewopuat	II	20 – 40 Km
	3	Desa Wolompa	II	20 – 40 Km
	4	Desa Rubit	II	20 – 40 Km
	5	Desa Baomekot	II	20 – 40 Km
	6	Desa Munerana	II	20 – 40 Km
	7	Desa Kajowair	II	20 – 40 Km
<b>14</b>	<b>Kecamatan Kangae</b>			
	1	Desa Teka iku	II	20 – 40 Km
	2	Desa Mekendetung	Daerah SulitI	
	3	Desa Blatation	II	20 – 40 Km
	4	Desa Kokowahor	II	20 – 40 Km
	5	Desa Watumilok	II	20 – 40 Km
	6	Desa Tanaduen	II	20 – 40 Km
	7	Desa Watuliwung	II	20 – 40 Km
	8	Desa Habi	II	20 – 40 Km
	9	Desa Langir	II	20 – 40 Km
<b>15</b>	<b>Kecamatan Doreng</b>			
	1	Desa Wolomotong	III	40 – 60 Km
	2	Desa Kloangpopot	III	40 – 60 Km
	3	Desa Wogalirit	III	40 – 60 Km
	4	Desa Waihawa	III	40 – 60 Km
	5	Desa Nenbura	III	40 – 60 Km
	6	Desa Wolonterang	III	40 – 60 Km

	7	Desa watumerak	III	40 – 60 Km
<b>16</b>	<b>Kecamatan Mapitara</b>			
	1	Desa Natakoli	III	40 – 60 Km
	2	Desa Hebing	III	40 – 60 Km
	3	Desa Hale	III	40 – 60 Km
	4	Desa Egongahar	III	40 – 60 Km
<b>17</b>	<b>Kecamatan Waiblama</b>			
	1	Desa Natarmage	III	40 – 60 Km
	2	Desa Pruda	III	40 – 60 Km
	3	Desa Werang	Daerah Sulit I	-
	4	Desa Tanarawa	Daerah SulitI	-
	5	Desa Linmedo	Daerah Sulit I	-
	6	Desa Tua Bao	Daerah SulitI	-
<b>18</b>	<b>Kecamatan Paga</b>			
	1	Desa Wolowiro	Daerah SulitI	-
	2	Desa Maulo'o	Daerah SulitI	-
	3	Desa Mbegu	Daerah SulitI	-
	4	Desa Paga	III	40 – 60 Km
	5	Desa Lenanderata	Daerah SulitI	-
	6	Desa Masebewa	Daerah SulitI	-
	7	Desa Wolorega	Daerah SulitI	-
	8	Desa Wolowena	Daerah SulitI	-
<b>19</b>	<b>Kecamatan Mego</b>			
	1	Desa Korobhera	Daerah SulitII	-
	2	Desa Dobo	Daerah SulitII	-
	3	Desa Bhera	Daerah SulitII	-
	4	Desa Wolodhesa	Daerah SulitII	-
	5	Desa Gera	Daerah SulitII	-
	6	Desa Liakutu	Daerah SulitII	-
	7	Desa Parabubu	Daerah SulitII	-
	8	Desa Dobo Nua Pu'a	Daerah SulitII	-
	9	Desa Kowi	Daerah SulitII	-
	10	Desa Napugera	Daerah SulitII	-
<b>20</b>	<b>Kecamatan Tanawawo</b>			
	1	Desa Bu Selatan	Daerah SulitII	-
	2	Desa Detubinga	Daerah SulitII	-
	3	Desa Bu Utara	Daerah SulitII	-
	4	Desa Bu Watuweti	Daerah SulitII	-
	5	Desa Loke	Daerah SulitII	-
	6	Desa Renggarasi	Daerah SulitII	-

	7	Desa Poma	Daerah SulitII	-
	8	Desa Tuwa	Daerah SulitII	-
<b>21</b>	<b>Kecamatan Palue</b>			
	1	Desa Maluriwu	Antar PulauV	-
	2	Desa Rokirolet	Antar Pulau V	-
	3	Desa Tuanggeo	Antar Pulau V	-
	4	Desa Ladolaka	Antar Pulau V	-
	5	Desa Nitunglea	Antar Pulau V	-
	6	Desa Reruwairere	Antar Pulau V	-
	7	Desa Kesokoja	Antar Pulau V	-
	8	Desa Lidi	Antar Pulau V	-

*Gambar 3. Foto Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere*



Sebagai daerah yang berada di Kepulauan Flores dituntut untuk lebih memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap para pencari keadilan, serta untuk memenuhi tuntutan keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) oleh Pengadilan Agama Maumere sebagai bagian mewujudkan peningkatan transparansi pengadilan sebagaimana amanah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sudah dilakukandengan menyediakan media *Website* : [www.pa-maumere.go.id](http://www.pa-maumere.go.id). yang dapat di akses oleh masyarakat pencari keadilan secara umum, serta media Teknologi Informasi (TI) pendukung lainnya khusus internal aparatur

Pengadilan Agama Maumere yaitu aplikasi Pengelolaan Data dan Pengusulan Pegawai dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MARI dan Aplikasi Backup Sikep (ABS) Badilag MARI, Aplikasi Komdanas (Biaya Perkara, Kepegawaian dan Keuangan), Aplikasi PNBP SIMARI, E-Biling Simponi, Movev Bappenas, SAKPA, SILABI, dan email :pa.maumere@gmail.com.

### - **Visi dan Misi**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas, Pengadilan Agama Maumere telah menyusun program kerja sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Maumere dalam pencapaian Visi dan Misi serta tujuan organisasi.

#### *Visi*

Visi Pengadilan Agama Maumere mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu “**TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAUMERE YANG AGUNG**”.

#### *Misi*

Sedangkan untuk mencapai Visi tersebut Pengadilan Agama Maumere menetapkan Misi sebagai berikut:

1. **Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere;**
2. **Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;**
3. **Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Agama Maumere;**
4. **Meningkatkan pengawasan dan transparansi di Pengadilan Agama Maumere.**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Maumere tersebut, perlu membuat Motto sebagai identitas dan suplemen penyemangat kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere, adapun Motto Pengadilan agama maumere adalah “**CERDAS**” (*Cakap, Efektif dan Efisien, Ramah, Dinamis, Akuntabel, Sinergitas*).

Motto dan Visi Misi juga rutin dibaca bersama setiap apel pagi pada hari senin.

**- Rencana Strategis (Renstra)**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Pengadilan Agama Maumere mengambil langkah-langkah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA). Dengan rencana strategis ini maka implementasi target, output dan out come yang diinginkan tercapai. Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere telah dibuat sejak tahun 2015, terakhir disusun Rencana Strategis 2015-2019 yang sudah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kerja untuk tahun 2020.

Adapun Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere tahun 2020-2024 tersebut sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maumere

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang prima dan berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Agama Maumere

4. Meningkatkan pengawasan dan Transparansi di Pengadilan Agama Maumere

**Tabel. 2. Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024**

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target%				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	100	100	100	100

		n Tepat Waktu			n Tepat Waktu					
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	90	90	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	95	95	95
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	95	95	95	95
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	80	80	80	80
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang	10		Persentase Perkara yang	10	10	10	10	10

		Diselesaikan Melalui Mediasi			Diselesaikan Melalui Mediasi					
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang	100		Persentase Perkara yang	100	100	100	100	100

	Terpinggirkan	Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		Terpinggirkan	Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan					
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100

**- Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 berdasarkan SK.Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor :W23-A9/ 112 /KP.00.3/1/SK/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

*Tabel. 3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020*

NO	TUJUAN		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara tahunlalu dibagi jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang ada dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	Sisa perkara tahun lalu dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <input type="checkbox"/> Banding <input type="checkbox"/> Kasasi <input type="checkbox"/> PK	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan perkara dikali seratur persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Indeks kepuasan pencari keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

			dikali seratus persen		
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dibagi jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dibagi jumlah putusan perkara dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo dikali seratus persen	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dibagi jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan dikali seratus persen	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan ( <i>Voluntair</i> ) identitas hukum.	Jumlah perkara volunter identitas hukum yang diselesaikan dibagi jumlah perkara Volunter identitas hukum yang diajukan dikali seratus persen	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan

		golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	mendapatkan layanan bantuan hukum dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali seratus persen		Tahunan
4	Meningkatnya Kepautahan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi).	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dibagi jumlah putusan perkara yang sudah BHT dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

## BAB II

## KEADAAN PERKARA

## A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama

## - Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara adalah suatu laporan tentang keadaan perkara pada Pengadilan Agama Maumere yang diuraikan dengan meliputi sisa perkara tahun lalu, perkara yang masuk pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan Jenis perkara, perkara yang putus ditahun berjalan, sisa perkara tahun berjalan, Pengelolaan Biaya Proses dan Keadaan Keuangan Perkarayang penyajiannya digambarkan baik dalam suatu narasi, statistik, maupun grafik.

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Kondisi Perkara pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2020 :

- |                                    |   |    |         |
|------------------------------------|---|----|---------|
| a. Sisa perkara tahun 2019         | : | 3  | Perkara |
| b. Perkara masuk tahun 2020        | : | 61 | Perkara |
| c. Perkara yang diputus tahun 2020 | : | 63 | Perkara |

**Dengan rincian sebagai berikut :**

- Perkara yang dicabut : 1 Perkara
- Perkara yang dikabulkan : 59 Perkara
- Perkara yang ditolak : 1 Perkara
- Perkara yang tidak diterima : 0 Perkara
- Perkara yang di gugurkan : 2 Perkara
- Perkara yang dicoret : 0 Perkara

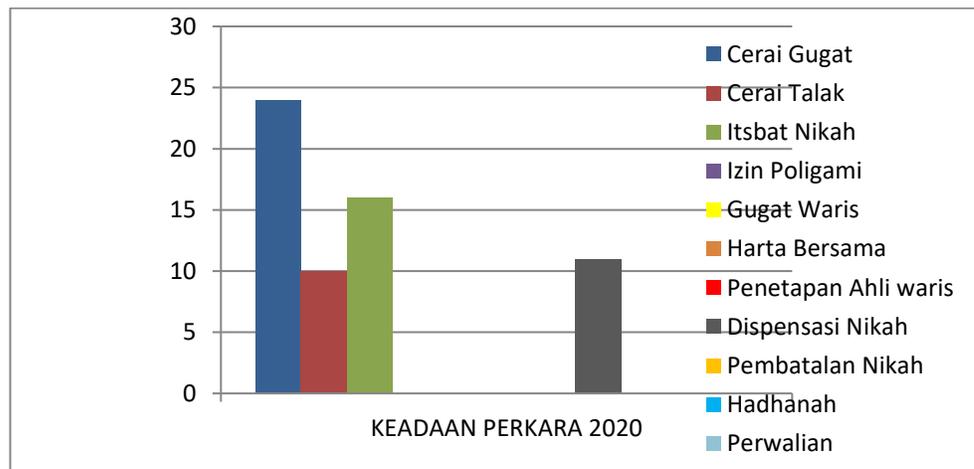
Perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2020, berjumlah 61 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . 4. Jenis dan Jumlah Perkara PA. Maumere Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	24	Perkara
2.	Cerai Talak	10	Perkara
3.	Itsbat Nikah	16	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	11	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
<b>JUMLAH</b>		<b>61</b>	<b>Perkara</b>

Berikut Data grafiknya Perkara Tahun 2020

Grafik. 1. Jenis dan Jumlah perkara yang diterima PA. Maumere



d. Sisa Perkara tahun 2020 sebanyak 1 Perkara

Adapun rincian sisa perkara Tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel . 5. Jenis dan Jumlah Sisa Perkara PA. Maumere Tahun 2020

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jumlah
1	30/Pdt.G/2020/PA.Mur.	Cerai Gugat	1 Perkara
<b>Jumlah Perkara</b>			<b>1Perkara</b>

e. Keadaan Keuangan Perkara Sisa Tahun 2020

Berdasarkan keadaan keuangan 1 (satu) perkara sisa dan dengan data dukung pada Aplikasi SIPP serta Aplikasi E-Keluangan Perkara, keadaan sisa keuangan perkara sampai pada tanggal 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam rincian berikut :

Tabel . 6. Sisa uang Perkara PA. Maumere Tahun 2020

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jumlah Sisa
1	30/Pdt.G/2020/PA.Mur.	Cerai Gugat	226.000
<b>Jumlah Perkara</b>			<b>226.000</b>

f. Pengelolaan Biaya Proses

Pengelolaan biaya proses Tahun 2020 berdasarkan jumlah penerimaan perkara dan data base Komdanas biaya perkara dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel . 7. Penerimaan dan pengeluaran Biaya proses PA. Maumere Tahun 2020

No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1	Januari	300.000	300.000	0
2	Februari	450.000	450.000	0
3	Maret	450.000	450.000	0
4	April	200.000	200.000	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	200.000	200.000	0
7	Juli	150.000	150.000	0
8	Agustus	600.000	600.000	0

<b>9</b>	September	150.000	150.000	0
<b>10</b>	Oktober	300.000	300.000	0
<b>11</b>	November	200.000	200.000	0
<b>12</b>	Desember	50.000	50.000	0
<b>Jumlah</b>		<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0</b>

**- Keadaan Perkara Tingkat Banding**

Keadaan perkara tingkat Banding merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang Mengajukan banding pada Tahun 2020 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. Sisa perkara Banding tahun 2019 : 0 Perkara
- b. Perkara Banding masuk tahun 2020 : 0 Perkara
- c. Perkara Banding yang diputus tahun 2020 : 0 Perkara
- d. Sisa Perkara Banding tahun 2020 : 0 Perkara

**Tabel . 8. Jenis dan Jumlah Perkara Banding PA. Maumere**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
<b>1.</b>	Cerai Gugat	0	Perkara
<b>2.</b>	Cerai Talak	0	Perkara
<b>3.</b>	Itsbat Nikah	0	Perkara
<b>4.</b>	Izin Poligami	0	Perkara
<b>5.</b>	Gugat Waris	0	Perkara
<b>6.</b>	Harta Bersama	0	Perkara
<b>7.</b>	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
<b>8.</b>	Dispensasi Nikah	0	Perkara
<b>9.</b>	Pembatalan Nikah	0	Perkara
<b>10.</b>	Hadhanah	0	Perkara
<b>11.</b>	Perwalian	0	Perkara
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>Perkara</b>

- **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Keadaan perkara tingkat kasasi merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya Kasasi di Mahkamah Agung;

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang Mengajukan Kasasi pada Tahun 2020 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. Sisa perkara Kasasi tahun 2019 : 0 Perkara
- b. Perkara Kasasi masuk tahun 2020 : 0 Perkara
- c. Perkara Kasasi yang diputus tahun 2020 : 0 Perkara
- d. Sisa Perkara Banding tahun 2020 : 0 Perkara

**Tabel . 9. Jenis dan Jumlah PerkaraKasasi PA. Maumere**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	0	Perkara
2.	Cerai Talak	0	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>Perkara</b>

- **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)**

Keadaan perkara tingkat Peninjauan Kembali (PK) merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung yang dengan adanya bukti-bukti baru yang diajukan yang memenuhi legal Standing pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK).

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2020 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. Sisa perkara PK tahun 2019 : 0 Perkara
- b. Perkara PK masuk tahun 2020 : 0 Perkara
- c. Perkara PK yang diputus tahun 2020 : 0 Perkara
- d. Sisa Perkara PK tahun 2020 : 0 Perkara

**Tabel .10. Jenis dan Jumlah PerkaraKasasi PA. Maumere**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	0	Perkara
2.	Cerai Talak	0	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>Perkara</b>

**B. Penyelesaian Perkara**

Keadaan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Maumere untuk tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2019. Adapun Untuk tahun 2018 jumlah perkara yang diterima adalah 65, pada tahun 2019 jumlah perkara yang diterima adalah 55, dan untuk tahun 2020 jumlah perkara yang diterima adalah 61 Berikut kami tampilkan grafik perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere dari tahun 2018 sampai dengan 2020:

GRAFIK 2 . Penerimaan Perkara PA. Maumere 3 Tahun terakhir



- **Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus**

Kondisi jumlah sisa Perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2019 :

- a. Sisa perkara tahun 2019 : 3 Perkara
- b. Sisa Perkara yang diputus tahun 2020 : 3 Perkara

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel . 11. Jenis dan Jumlah Sisa perkara yang diputus Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	0	Perkara
2.	Cerai Talak	3	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>Perkara</b>

**- Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu**

Batas waktu penyelesaian perkara pada tingkat pertama mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, dan pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Maumere telah memutus Perkara sebanyak 63 perkara dengan rincian sisa perkara Tahun 2019 sebanyak 3 Perkara dan Perkara Yang diterima Tahun 2020 sebanyak 61 Perkara.

**Tabel . 12. Jenis dan Jumlah Perkara yang dipurus tepat waktu Tahun 2020**

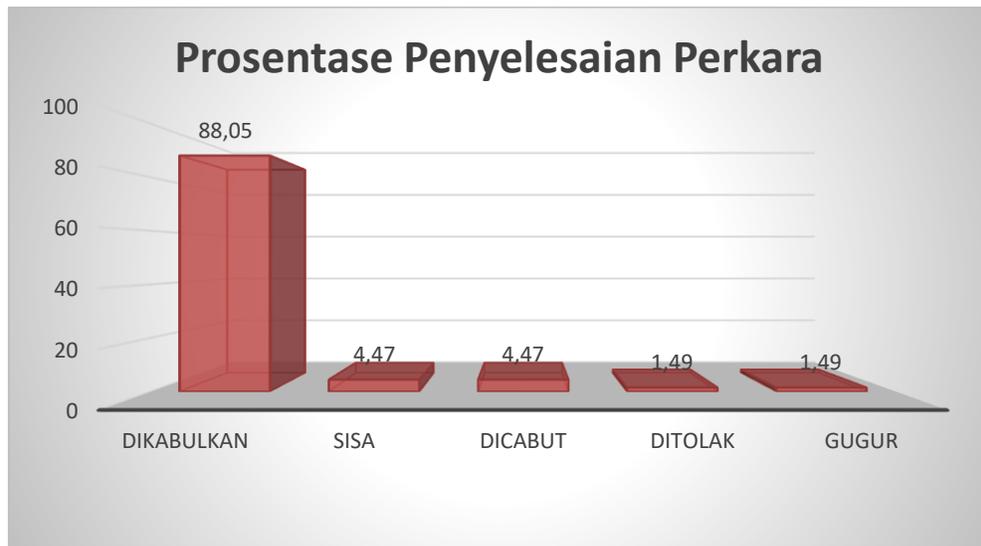
No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	23	Perkara
2.	Cerai Talak	13	Perkara
3.	Itsbat Nikah	16	Perkara
4.	Izin Poligami	-	Perkara
5.	Gugat Waris	-	Perkara
6.	Harta Bersama	-	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	-	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	11	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	-	Perkara
10.	Hadhanah	-	Perkara
11.	Perwalian	-	Perkara
<b>JUMLAH</b>		<b>63</b>	<b>Perkara</b>

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2020 dalam prosentase adalah seperti tabel berikut ini :

**Tabel . 13. Prosentase penyelesaian Perkara PA. Maumere**

TH. 2020	DITERIMA		PUTUS	DICABUT	DITOLAK	DICORET	GUGUR	SISA	PROSENTASE PENYELESAIAN
	SISA 2019	JUMLAH							
61	3	64	59	1	1	0	2	1	96,52%

Grafik 3. Prosentase penyelesaian Perkara P.A. Maumere



Jumlah perkara Gugatan yang putus selama Tahun 2020 adalah 36 perkara. Adapun Penyebab terjadinya perceraian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- |                                  |   |           |                |
|----------------------------------|---|-----------|----------------|
| a. Zina                          | : | -         | Perkara        |
| b. Mabuk                         | : | 1         | Perkara        |
| c. Madat                         | : | -         | Perkara        |
| d. Judi                          | : | -         | Perkara        |
| e. Meninggalkan Salah Satu Pihak | : | 3         | Perkara        |
| f. Dihukum Penjara               | : | -         | Perkara        |
| g. Poligami                      | : | -         | Perkara        |
| h. KDRT                          | : | -         | Perkara        |
| i. Cacat Badan                   | : | -         | Perkara        |
| j. Perselisihan Terus Menerus    | : | 28        | Perkara        |
| k. Kawin Paksa                   | : | 1         | Perkara        |
| l. Murtad                        | : | 1         | Perkara        |
| m. Ekonomi                       | : | -         | Perkara        |
| n. Cabut                         | : | 1         | Perkara        |
| o. Gugur                         | : | 1         | Perkara        |
| <b>Jumlah</b>                    | : | <b>36</b> | <b>Perkara</b> |

- **Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)**

Perkara Pada Pengadilan Agama Maumere yang putus sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 63 Perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 14. Perkarayang tidak mengajukan upaya Banding, kasasi, PK, PA. Maumere

No	Jenis Perkara Putus	Jumlah	
1	Kabul	59	Perkara
2	Gugur	2	Perkara
3	Tolak	1	Perkara
4	Cabut	1	Perkara
<b>Jumlah Perkara</b>		<b>63</b>	<b>Perkara</b>

Dari seluruh perkara yang telah diputus tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. Dengan kata lain semua perkara pada Pengadilan Agama Maumere sampai dengan Desember 2020 tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun PK.

- **Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi**

Mediasi pada Pengadilan Agama Maumere untuk tahun 2020 dapat dilihat dalam rincian tabel berikut :

Tabel . 15. Hasil Mediasi Perkara PA. Maumere

No	Hasil Mediasi	Jumlah	
1	Berhasil	-	Perkara
2	Tidak Berhasil	8	Perkara
3	Gagal	-	Perkara
4	Damai	-	Perkara
5	Masih Dalam Proses	-	Perkara
<b>Jumlah Perkara</b>		<b>8</b>	<b>Perkara</b>

**C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi Iso Pengadilan)**

Pengadilan Agama Maumere adalah salah satu satuan kerja tingkat pertama yang telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dulunya adalah SAPM, Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 3955/DJA/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang hasil rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020, Pengadilan Agama Maumere kembali memperoleh *Predikat A Excellent*. Adapun Surat Keputusan Nomor W23-A9/622/kp.00.3/SK/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Maumere tahun 2020 dengan susunan sebagai berikut :

**Tabel. 16. Susunan Tim APM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	4	5
1	Acep Sugiri, S.Ag.M.Ag 19730804.200112.1.003	Ketua	Top Manajemen
2	Suratnah Bao, S.Ag., M.H. 19740301.200604.2.001	Wakil Ketua	Ketua APM
3	Drs. Yacub, M.H. 19660718.199903.1.001	Panitera	Sekretaris APM
4	Jufri Endo, S.H.I. 19710421.199603.1.002	Sekretaris	Sekretaris APM
5	Fauzy Arizona, S.Sy. 19880626.201712.1.003	Hakim Pratama	Koordinator Asessor Internal
6	Ahmad Muliadi, S.Sy. 19921102.201712.1.002	Hakim Pratama	Sekretaris Asessor/Anggota
7	Muhammad Rizki, S.H. 1984081620111006	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator pengendalian Dokumen Kontrol APM
8	Sigit Apriluberta, S.H 198204262006041004	Panmud Permohonan	Sekretaris
9	Abdullah, S.H. M.H 1960080620121002	Panmud Hukum	Anggota

10	Abdullah, S.H, M.H. 1960080620121002	Panmud Hukum	Koordinator Survey Kepuasan Masyarakat Sekretaris
11	Sigit Apriluberta, S.H. 198204262006041004	Panmud Permohonan	
12	Hamzah Usman 19741102.201408.1.002	Jurusita	Anggota

**- Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) atau Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum**

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Maumere yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT Cabang Maumere, sebagaimana yang tertuang dalam *Memorandum Of Understanding (MOU)* Nomor : W23-A9/175/OT.01.3/2/2020 tanggal 2 Januari 2020 dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu (*Justice For All*), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dengan pembiayaan oleh Negara.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Maumere mendapatkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Jasa Layanan Bantuan Hukum sebesar Rp. 24.000.000,- dan telah merealisasikan pelaksanaan Pos Layanan Hukum /Posbakum dengan jumlah jam pelayanan sebanyak 300 jam layanan dengan biaya sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua puluh empat juta rupiah*) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 0 (Nihil). Dalam hal ini capaian pelaksanaan realisasi Pos Layanan Hukum/Posbakum sebesar 100%.

**- Sidang Keliling /Pelayanan Terpadu**

Pelaksanaan Sidang keliling dengan pelayanan terpadu belum dapat dilaksanakan karena berdasarkan hasil koordinasi dari instansi terkait (Dinas

Dukcapil Kab. Sikka dan Kantor Kementerian Agama Kab. Sikka), instansi yang bersangkutan masih mempunyai kegiatan yang padat, sehingga pada tahun 2020 Pengadilan Agama Maumere hanya melaksanakan Sidang Keliling Insidentil dengan jumlah sebanyak 15 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perkara Cerai Gugat sebanyak 3 perkara
- b. Perkara Cerai Talak sebanyak 0 perkara
- c. Perkara Isbat Nikah sebanyak 12 perkara
- d. Perkara putus sebanyak 14 perkara
- e. Perkara digugurkan sebanyak 1 perkara

Pada Tahun 2020 ini, sidang keliling dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di wilayah kepulauan dan dengan rincian lokasinya sebagai berikut :

- a. Sidang keliling Gel. I bertempat Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebanyak 4 perkara.
- b. Sidang keliling Gel. II bertempat di Dusun Dambila, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebanyak 1 perkara. dan
- c. Sidang keliling Gel. III, bertempat di Pulau Pangabatang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebanyak 10 perkara.

Gambar. 3. Foto Kegiatan Sidang Keliling Desa Pemana Gel. I PA. Maumere



Gambar. 4. Foto Kegiatan Sidang Keliling Dusun Dambila, Desa Parumaan Gel. II PA. Maumere



Gambar. 5. Foto Kegiatan Sidang Keliling Pulau Pangabatan, Desa Parumaan Gel. III PA. Maumere



#### - **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Perkara Prodeo merupakan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere yang beban biaya perkaranya ditanggung oleh Negara, sesuai alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020, yang syarat untuk mendapatkan layanan prodeo dari Pengadilan Agama Maumere dengan melampirkan Surat Permohonan berperkara secara Prodeo, Fc. Kartu Tanda Penduduk/Domisili dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)/ Kartu Indonesia Sehat maupun kartu lainnya yang menyatakan warga miskin sebagaimana amanah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Untuk Tahun 2020 jumlah perkara prodeo yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere adalah sebanyak 17 perkara dengan rincian sebagai berikut :

a. Perkara Cerai Talak sebanyak	0 perkara
b. Perkara Cerai Gugat sebanyak	5 perkara
c. Perkara Isbat Nikah sebanyak	12 perkara
d. Perkara putus sebanyak	17 perkara
e. Perkara digugurkan sebanyak	1 perkara
f. Sisa	0 perkara.

## BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

## ❖ Komposisi Sumber Daya Manusia

Gambar 6. Foto SDM aparatur PA. Maumere



Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting, dimana Aparatur Peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan roda

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Agama) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang peradilan. Sehingga SDM yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen SDM yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi. Sejalan dengan arahan Reformasi Birokrasi, Pengadilan Agama Maumere telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.

Dalam memperoleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, terintegrasi dan profesional, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan Pembinaan internal untuk pegawai Pengadilan Agama Maumere dengan dilaksanakan apel pagi setiap hari Senin dan apel sore setiap hari Jum'at, rapat bulanan secara berkala juga mengikutsertakan pegawai pada kegiatan-kegiatan Diklat, Sosialisasi, Pelatihan/Bimbingan Teknis Yustisial maupun Tata

kelola keuangan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) itu sendiri. Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tersebut semakin lebih ditingkatkan khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur maupun dalam peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan seperti Implementasi Pelayanan PTSP dengan prinsip 3 S (Senyum, Salam, Sapa) dan 5 (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), maupun sosialisasi implementasi 9 (sembilan) aplikasi unggulan Badan Peradilan Agama yang kegiatannya diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere secara berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Maumere dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Maumere.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2020 adalah 10 Pegawai, lebih rinci keadaannya dapat dilihat dari paparan tabel sebagai berikut :

**Tabel. 17. Bagan nama –nama Pegawai Pengadilan Agama Maumere**

No	Nama	Jabatan	Pangkat/ Gol. Ruang
1	Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.	Ketua	Pembina, IV/a
2	Suratnah Bao, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Pembina, IV/a
3	Fauzy Arizona, S.Sy.	Hakim Pratama	Penata muda, III/a
4	Ahmad Muliadi, S.Sy.	Hakim Pratama	Penata muda, III/a
5	Mustajib, S.H.I.	Panitera	Penata Tk. I, III/d
6	Jufri Endo, S.H.I.	Sekretaris	Penata, III/d
7	Abdullah, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penata Tk. I, III/d

8	Mohammad Rizky, S.H	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata, III/c
9	Sigit Apriluberta, S.H.	Panmud Permohonan	Penata Muda, Tk.I, III/b
10	Hamzah Usman	Jurusita	Pengatur Muda Tk.I, II/b

Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Maumere berdasarkan penggolongan Yudisial adalah sebagai berikut :

- **Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial**

Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Maumere terdiri dari :

a. 4 orang Hakim, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) 1 Orang Ketua
- 2) 1 Orang Wakil Ketua
- 3) 2 Orang Hakim

b. 3 Orang Panitera/Panitera Muda dan Panitera Pengganti, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) 1 Orang Panitera
- 2) 1 Orang Panitera Muda Hukum
- 3) 1 Orang Panitera Muda Permohonan

c. 1 Orang Jususita.

- **Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

Sumber daya manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Agama Maumere tahun 2020 terdiri dari:

- a. 1 Orang Sekretaris ;
- b. 1 Orang Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- c. Kasubag Umum & Keuangan ( Mengalami kekosongan jabatan )
- d. Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana ( Mengalami Kekosongan Jabatan )

- e. 1 orang Bendahara di Perbantukan (merangkap jabatan Jusurita)
- f. Semua kelompok jabatan fungsional Kesekretariatan (Bendaharawan, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Pustakawan) masih mengalami kekosongan sejak Tanggal 28 Desember 2015 sampai saat ini;

Dalam menjalankan pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Maumere disamping Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis dan Non Teknis Yudisial, juga dibantu dengan tenaga kontrak yang sumber pembiayaannya berasal dari Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2020 yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari :

- b. Pegawai Honorer/Pramubhakti 3 orang;
- c. Pegawai Honorer/Pengamanan Sidang 1 orang; dan
- d. Pegawai Honorer/Sopir 2 orang.

yang diperbantukan 2 orang di bidang Kesekretariatan dan 3 orang di bidang Kepaniteraan.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Honorer/Pramubhakti lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel . 18. Daftar Nama Tenaga Honorer/Pramubhakti PA. Maumere**

No	Nama	Tahun Masuk/ Pendidikan	Jabatan Tugas	Tugas Tambah	Jumlah
1	Saudah Yahya, S.H.I.	2001 S.1	Pramubhakti	Staf Umum (Operator Aplikasi Surat dan Petugas Kearsipan Bidang Kesekretariatan)	1
2	M. Ikram Muslimin, S.E.	2012 Tahun, S.1	Pramubhakti	Staf Kepaniteraan (Admin SIPP)	1
3	Nasarudin U Mau	2014 SMA	Satpam	Pengamanan Kantor dan Pengamanan Sidang	1

4	Ika Asti Hana, S.E.	2015, S.1	Pramubhakti	Staf Kepaniteraan Penulis Register dan Buku Induk Keuangan	1
5	Muhammad Fauzi Lanjar	2016 SMA	Sopir	Staf Kepegawaian (Operator SIKEP MARI dan ABS Badilag)	1
6	Arif Budi Satriawan, S.ST.	2018, S.1	Sopir	Staf Kepaniteraan (Admin Direktori Putusan dan SIPP) serta Pengamanan Sidang	1
<b>JUMLAH</b>					<b>6</b>

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang;  
Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang pangkat/golongan ruang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 19. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pangkat/Golongan ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	2 Orang
2	Penata Tk. I	III/d	3 Orang
3	Penata	III/c	1 Orang
4	Penata Muda Tk. I	III/b	1 Orang
5	Penata Muda	III/a	2 Orang
6	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jenjang pendidikan;

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel . 20. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S. 2	3 Orang
2	S. 1	6 Orang
3	D III	0 Orang
4	SMA / Madrasah Aliyah	1 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jenis Kelamin;

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel . 21. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	9 Orang
2	Perempuan	1 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Usia;

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang Usia dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel . 22. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Usia**

No	Usia	Jumlah
1	22 s.d. 29	2 Orang
2	30 s.d. 39	2 Orang
3	40 s.d. 49	5 Orang
4	50 s.d. 59	1 Orang
5	60 s.d. 66	0 Orang

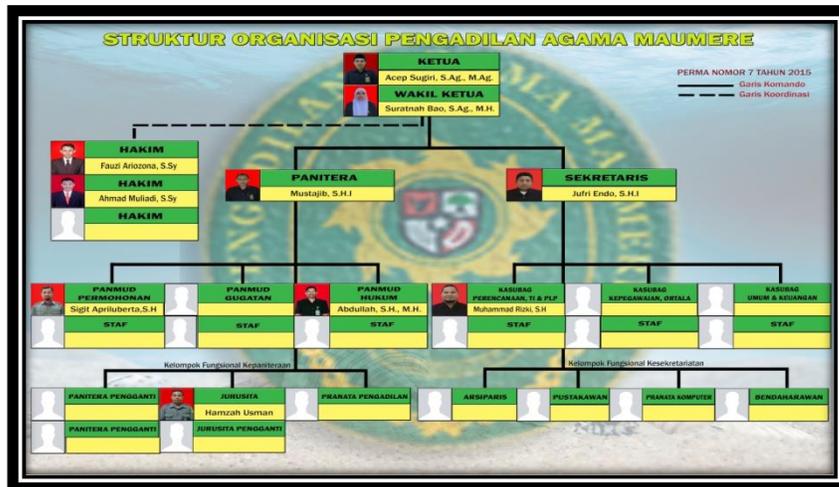
❖ **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere telah mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai Pimpinan yang membawahi para Hakim sebagai pejabat fungsional dalam mengadili dan memutus perkara yang diajukan, dan selanjutnya ada 2 (dua) yaitu bidang pertama yaitu Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera yang membawahi Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum serta Jabatan Fungsional kepaniteraan yaitu Panitera Pengganti, Jurusita/jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan. Kemudian bidang kedua yaitu Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, serta Jabatan fungsional Kesekretariatan yaitu Fungsional Bendahara, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Pustakawan.

Secara umum stuktur organisasi Pengadilan Agama Maumere menggambarkan suatu susunan dan hubungan kerja baik secara komando maupun kordinasi tiap bagian yang pemisahannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere tahun 2020 sebagai berikut :

**Gambar. 7. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere**



Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama Maumere tersebut diatas, Pengadilan Agama Maumere membagi tugas para pejabat dilingkungan satuan kerja sebagai berikut:

**1. Ketua**

Ketua Pengadilan Agama Maumere (Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag) mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktur Jenderal badan Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Pengadilan Agama Maumere (Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag) menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Maumere sejak 14 Mei 2019 sampai dengan sekarang. Lebih rinci dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 23. Bagan nama Ketua Pengadilan Agama Maumere**

No	Nama Pejabat	Jabatan	TMT Jabatan	Ket
1	Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.	Ketua	14 Mei 2019 s.d. Sekarang	Aktif

**2. Wakil Ketua**

Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere (Suratnah Bao, S.Ag., M.H) mempunyai tugas dan fungsi mewakili Ketua Pengadilan Agama Maumere dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktur Jenderal badan Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Wakil Ketua(Suratnah Bao, S.Ag., M.H) Pengadilan Agama Maumere telah menjabat sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai sekarang. Dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel. 24. Bagan nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere**

No	Nama Pejabat	Jabatan	TMT Jabatan	Ket
2	Suratnah Bao, S.Ag., M.H	Wakil	10 Mei 2019 s.d. Sekarang	Aktif

**3. Hakim**

Hakim Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas dan fungsi untuk meneliti dan mencatat berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang (Hakim Tunggal), menyidangkan perkara, memuat putusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere.

Hakim Pengadilan Agama Maumere dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 25. Bagan nama Hakim Pengadilan Agama Maumere**

No	Nama	GOL.	TMT Hakim	Masa Kerja	Ket
1	Suratnah Bao, S.Ag., M.H	III/d	29-07-2009	10 Tahun 05 Bulan	Aktif
2	Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.	IV/a	01-08-2009	10 Tahun 04 Bulan	Aktif
3	Fauzy Arizona, S.Sy	III/a	27-04-2020	0 Tahun 08 Bulan	Aktif
4	Ahmad Muliadi, S.Sy	III/a	27-04-2020	0 Tahun 08 Bulan	Aktif

**4. Panitera**

Panitera Pengadilan Agama Maumere (Mustajib, S.H.I) bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi kepaniteraan, administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dilingkungan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

**5. Panitera Muda**

**a. Panitera Muda Hukum**

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Maumere (Abdullah, S.H., M.H) bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara, menyajikan statistik data perkara, menyusun/membuat laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan melakukan pengurusan administrasi, pemberian keterangan dan mengkoordinir, memasukkan data perkara, anonimasi perkara yang putus dan berkekuatan hukum tetap serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**b. Panitera Muda Gugatan**

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Maumere bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan, untuk Jabatan Panitera Muda Gugatan mengalami kekosongan Jabatan dari tanggal 01 Agustus Tahun 2020.

**c. Panitera Muda Permohonan**

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Maumere (Sigit Apriluberta, S.H) bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.

**6. Panitera Pengganti**

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, serta membuat berita acara sidang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara Majelis Hakim/Hakim tersebut, dan juga menyelesaikan administrasi persidangan. Secara realitas jabatan Panitera pengganti yang ada di Pengadilan Agama Maumere saat ini tidak ada. Untuk sementara Panitera Sidang/Panitera Pengganti di rangkap oleh Panitera (Mustajib, S.H.I), Panitera Muda Hukum (Abdullah, S.H., M.H) dan panitera Muda Permohonan(Sigit Apriluberta,S.H) keadaan panitera sidang/pengganti dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 26. Bagan nama Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere**

No	Nama	GOL.	TMT Panitera Pengganti	Masa Kerja	Ket
2	Mustajib, S.H.I	IV/a	13-11-2020	00 Tahun 02 Bulan	Aktif
3	Abdullah, S.H., M.H.	III/d	04-01-2016	03 Tahun 11 Bulan	Aktif
4	Sigit Apriluberta, S.H.	III/b	01-08-2019	1 Tahun 04 Bulan	Aktif

## 7. Jurusita

Jurusita Pengadilan Agama Maumere (**Hamzah Usman**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan semua perintah yang berhubungan dengan tugas-tugas kejurusitaan antara lain Pemanggilan para pihak, menyampaian Pengumuman, Teguran (Anmaning) melakukan penyitaan, dan membuat berita acara penyitaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis/Hakim yang dikoordinir oleh Panitera.

## 8. Sekretaris (Jufri Endo, S.H.I)

Sekretaris Pengadilan Agama Maumere (**Jufri Endo, S.H.I**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi kepada semua unsur di Pengadilan Agama Maumere serta membawahi Kepala Sub Bagian (Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan), (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana), (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan), Jabatan Fungsional Kesekretariatan (Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan Bendahara) dan Staf Kesekretariatan.

## 9. Kepala Sub Bagian

### a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Maumere (**Mohammad Rizki, S.H**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, statistik, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi, serta Pelaporan.

### b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan Kepegawaian, Penataan organisasi dan Tata Laksana, untuk saat ini Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mengalami Kekosongan Jabatan.

### c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, pengarsipan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta pengelolaan keuangan, Untuk saat ini Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pada Pengadilan Agama Maumere mengalami kekosongan Jabatan

**- Mutasi**

Mutasi yang merupakan salah satu hal yang selalu dilakukan untuk memenuhi hak-hak personal maupun demi kebutuhan organisasi, yang terkadang cenderung teraktualisasi sebagai *Reward* namun ada juga sebagai *Punishment*.Regulasi pengaturan mutasi baik Hakim, tenaga teknis Kepaniteraan dan Juga Tenaga Kesekretariatan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahakamh Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Penggambaran secara lebih detail terdapat mutasi pegawai Pengadilan Agama Maumere dirincikan pada tabel sebagai berikut :

**a. Mutasi Tempat Tugas**

1. Pegawai yang mutasi masuk di Pengadilan Agama Maumere periode tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 27. Keadaan Pegawai yang mutasi masuk PA. Maumere

No	Nama	Jabatan		TMT	No. SK
		Lama	Baru		

1	Jufri Endo, S.H.I	Sekretaris PA Lewoleba	Sekretaris PA. Maumere	16 Desember 2019	1039/SEK/KP.I /SK/XII/2019
2	Muhammad Rizki, S.H	Kasubag Umum & Keungan	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	16 Desember 2019	1039/SEK/KP.I /SK/XII/2019
3	Mustajib, S.H.I	Panitera PA Ende	Panitera PA. Maumere	28Sep 2020	2224/Dja/KP0 4.6/SK/9/2020

2. Pegawai yang mutasi keluar di Pengadilan Agama Maumere tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel . 28. Keadaan Pegawai yang mutasi Keluar PA. Maumere**

No	Nama	Jabatan		TMT	No. SK
		Lama	Baru		
1	Rakimin Syarif, S.Ag	Sekretaris PA Maumere	Sekretaris PA Kalabahi	16 Desember 2019	1039/SEK/KP.I /SK/XII/2019
2	Tommi Pramana Putra, S.H	Kasubag Kepegawaian Ortala PA. Maumere	Staf PA Pangkajene	16 Maret 2020	144/SEK/KP.1/ III/2020
3	Fakar Nurhalim, S.Kom	Kasubag Umum & Keuangan PA. Maumere	Staf PA Karanganyar	3 Juli 2020	469/SEK/KP.1/ SK/VII/2020
4	Drs. Yacub, M.H	Panitera PA. Maumere	Panitera PA Bajawa	28Sep 2020	2223/Dja/KP04 .6/SK/9/2020

➤ **Mutasi Kenaikan Pangkat/Golongan, yaitu :**

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang Kenaikan Pangkat periode tahun 2020 sebanyak 1 (satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 29. Keadaan Kenaikan Pangkat/Golongan pegawai PA. Maumere

No	Nama	Pangkat Gol. Ruang		TMT	No. SK
		Lama	Baru	Pangkat	
1	Suratnah Bao, S.Ag.,M.H	Penata Tk.I, III/d	Pembina I V/a	1 Oktober 2020	1670/DJA/KP. 04.1/SK/9/202 0

➤ **Mutasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB)**

Untuk Periode Tahun 2020 tidak terdapat Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mengalami Kenaikan Gaji Berkala (KGB) .

Tabel . 30. Keadaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai PA. Maumere

No	Nama	TMT KGB		No. SK.	Tanggal
		Saat ini	YAD		Usul
1	-	-	-	-	-

- **Promosi**

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mendapatkan Promosi periode tahun 2020 sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 31. Keadaan Promosi pegawai PA. Maumere

NO	NAMA	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Sigit Apriluberta, S.H.	Penata Muda Tk.I, III/b	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere	Panmud Permohonan Pengadilan Agama Maumere

- **Pensiun**

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mengalami masa pensiun periode tahun 2020 sebanyak 1 (satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 32. Keadaan Kenaikan pangkat/Golongan pegawai PA. Maumere

No	Nama	Pangkat / gol.Ruang	Jabatan	TMT	Ket
1	2	3	4	5	

1	Yuhermi Natar, BA.	Penata, III/c	Panmud Gugatan	01 Agustus 2020	Proses Usulan
---	-----------------------	------------------	-------------------	-----------------------	------------------

**- Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis sumber daya manusia telah diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur atau lembaga pemerintah lainnya.

Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek yang telah diikuti oleh pegawai teknis maupun non teknis selama kurun waktu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Diklat SDM Teknis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020

Tabel . 33. Diklat SDM Teknis pegawai PA. Maumere

NO	N a m a	Nama Diklat/Bimtek	Lama/ Waktu Diklat/Bimtek	Penyelenggara
1	Ahmad Muliadi,S.Sy	Abstrak Putusan	3 Hari/ Media Zoom	Pusdiklat Menpim
2	Suratnah Bao, S.Ag.,M.H	Peningkatan Kapasitas Hakim	3 Hari/Media Zoom	Komis Yudisial
3	Suratnah Bao, S.Ag.,M.H	Analisis SWOT	3 Hari/ Media Zoom	Mahkamah Agung

b. Diklat SDM Non Teknis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020

Tabel . 34. Diklat SDM Non Teknis pegawai PA. Maumere

NO	N a m a	Nama Diklat/Bimtek	Lama Diklat/Bimtek	Penyelenggara
1	Mohammad Rizki, S.H	Teknis Presentasi Bahasa Inggris	1Hari/Media Zoom	Pusdiklat Menpim
2	Jufri Endo, S.H.I	Diklat PPK	7 hari	Litbang Kumdil

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Agama Maumere pada Tahun Anggaran 2020 mengelola 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi dengan nomor DIPA : SP DIPA-005.01.2.402851/2020 tanggal 13 November 2020, memiliki Pagu Awal sebesar Rp. 2.707.679.000 (*Dua Miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan Rupiah*). Sedangkan untuk Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan nomor DIPA : SP DIPA-005.04.2.402852/2020 tanggal 13 November 2020, memiliki Pagu Awal sebesar Rp. 60.320.000 (*Enam Puluh Juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah*). Terjadi 13 kali revisi Anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi dikarenakan ada beberapa kali penambahan anggaran dari DIPA BUN (Bendahara Umum Negara) sampai dengan terakhir revisi 13 pada tanggal 13 Desember 2020 dikarenakan terdapat minus pada belanja pegawai, sehingga Pagu Anggaran menjadi Rp. 2.625.819.000 (*Dua Miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus Sembilan belas ribu Rupiah*). Detail realisasi pagu per jenis belanja pada masing-masing unit organisasi adalah sebagai berikut :

#### 1. Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi

##### a. Belanja Pegawai

Pagu belanja pegawai pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 1.741.533.000 (*Satu Milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah*). Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang peruntukannya antara lain untuk gaji, tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak

termasuk dalam belanja pegawai. Selama satu tahun anggaran mengalami beberapa revisi, sampai dengan revisi ke-2 pada tanggal 15 Desember 2020 penambahan pagu anggaran dikarenakan terdapat pagu minus. Sehingga Pagu untuk belanja pegawai berkurang menjadi Rp.1.684.673.000,- (*Satu Milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 35. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (dalam rupiah)**

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.741.533.000	1.684.673.000	99,78 %	4.050.061

**b. Belanja Barang**

Pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020 tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp. 915.196.000 (*Sembilan ratus lima belas juta seratus Sembilan puluh enam ribu Rupiah*). Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Selama satu tahun anggaran mengalami beberapa revisi, sampai dengan revisi ke-13 pada tanggal 13 Desember 2020. Revisi tersebut adalah penambahan pagu anggaran dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk tambahan langganan Listrik, bantuan sewa rumah hakim dan tambahan Perjalanan Dinas Sehingga Pagu untuk belanja barang bertambah menjadi Rp. 741.146.000,- (*tujuh ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 36. Realisasi Anggaran Belanja Barang (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Barang	915.196.000	897.622.900	95,38 %	43.524.600

**c. Belanja Modal**

Pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta Rupiah*). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 37. Realisasi Anggaran Belanja Modal (dalam rupiah)

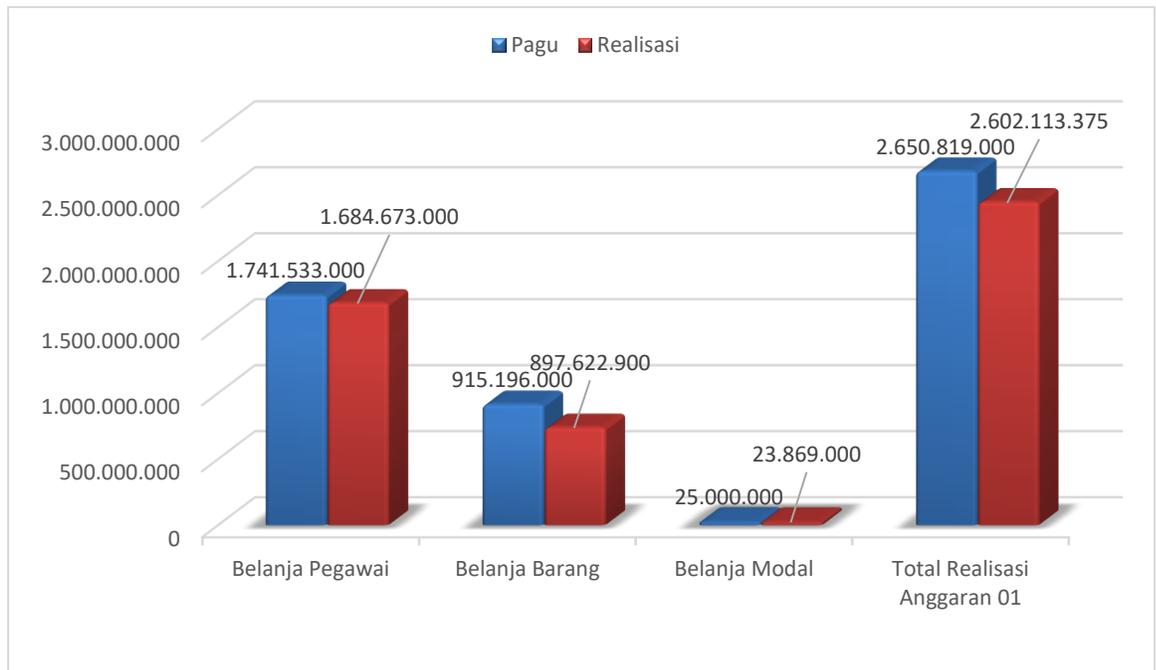
No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Modal	25.000.000	23.869.000	95,48 %	1.131.000

Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi, digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 38. Realisasi Anggaran Unit Organisasi (02) Badan Urusan Administrasi

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.741.533.000	1.684.673.000	99,78 %	4.050.061
2	Belanja Barang	915.196.000	897.622.900	95,38 %	43.524.600
3	Belanja Modal	25.000.000	23.869.000	95,48 %	1.131.000
<b>Total Realisasi</b>		<b>2.650.819.000</b>	<b>2.602.113.375</b>	<b>98,16 %</b>	<b>48.705.625</b>

**Grafik 4. Persentase Realisasi Anggaran Unit Organisasi (02) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2020**



**2. Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama**

**a. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara**

Pagu pembebasan biaya perkara untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2020 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 9.840.000,- (*Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 39. Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara (dalam rupiah)**

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pembebasan Biaya Perkara	9.840.000	9.797.000	99,56 %	43.000

**b. Biaya Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan**

Pagu biaya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2020 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 26.480.000,- (*dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 40. Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan (dalam rupiah)**

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	BelanjaPenyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan	26.480.000	26.480.000	100 %	0

**c. Jasa Konsultasi Bantuan Hukum**

Pagu jasa konsultasi bantuan hukum untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2020 tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua puluh empat juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 41. Realisasi Anggaran Jasa Konsultasi Bantuan Hukum (dalam rupiah)**

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	BelanjaJasa Konsultasi Bantuan Hukum	24.000.000	23.952.000	99,80 %	48.000

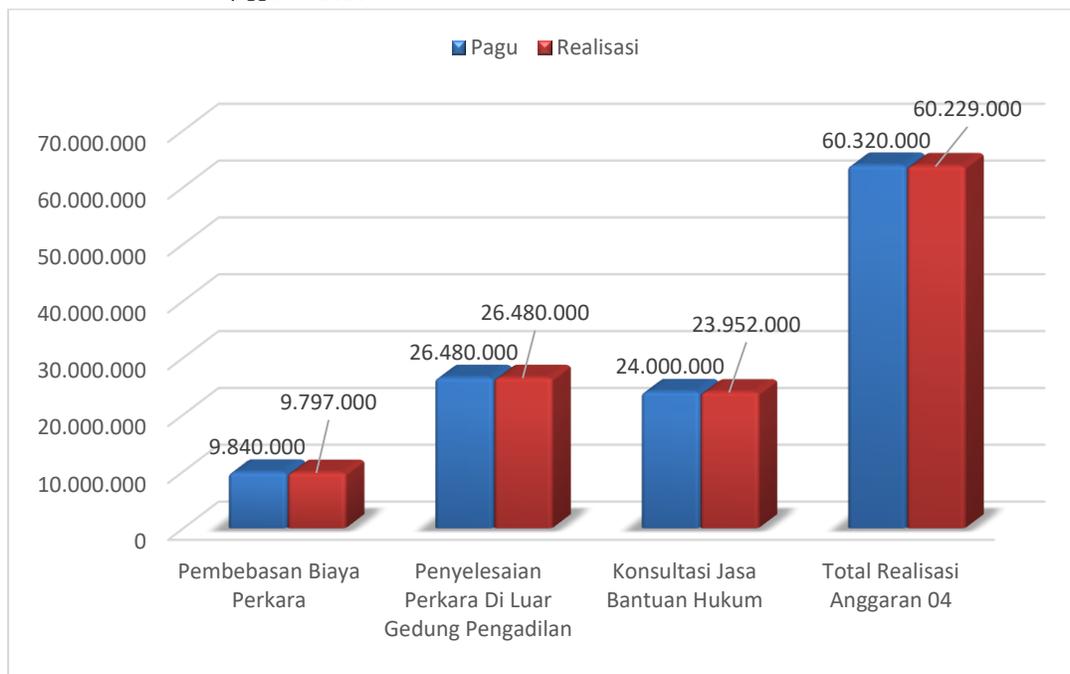
Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 42. Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Badan Peradilan Agama**

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	BelanjaPembebasan	9.840.000	9.797.000	99,56 %	43.000

	Biaya Perkara				
2	BelanjaPenyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan	26.480.000	26.480.000	100 %	0
3	Belanja Jasa Konsultasi Bantuan Hukum	24.000.000	23.952.000	99,80 %	48.000
<b>Total Realisasi</b>		<b>60.320.000</b>	<b>60.229.000</b>	<b>99,85%</b>	<b>91.000</b>

**Grafik 5. Persentase Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2020**



**B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Maumere sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik kepada para pencari keadilan. Mulai Tahun 2013, Pengadilan Agama Maumere telah menempati gedung Kantor baru yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kecamatan Alok Barat, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Dengan ditempatinya gedung kantor baru ini, diharapkan pelayanan publik yang diberikan kepada para pencari keadilan dapat lebih optimal karena sarana dan prasarana yang ada sudah cukup menunjang. Sehingga tahun demi tahun kantor Pengadilan Agama Maumere terus berusaha untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk

menunjang pelayanan prima kepada para pencari keadilan walaupun masih jauh dari sempurna. Sarana dan prasarana yang dimiliki sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

**1. Matriks Sarana dan Prasarana Gedung**

Gambar 8. Foto Sarana gedung PA. Maumere



Kantor Pengadilan Agama Maumere memiliki luas tanah keseluruhan 3.840 M<sup>2</sup>, dengan luas bangunan kantor 500 m<sup>2</sup> x 2 lantai = 1.000 M<sup>2</sup> yang diresmikan pada 31 Januari 2017 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Adapun

matriks sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel . 43. Sarana dan Prasarana Kantor PA. Maumere

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
<b>9.</b>	<b>PA. MAUMERE</b>				
<b>I</b>	<b>Sarana / Prasarana Gedung</b>				
1	Ruang Ketua	1	1	-	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	1	-	-
3	Ruang Hakim	1	1	-	-
4	Ruang Panitera	1	1	-	-
5	Ruang Sekretaris	1	1	-	-
6	Ruang Sidang Utama	1	1	-	-
7	Ruang Sidang II	1	1	-	-
8	Ruang Kepaniteraaan	1	1	-	-
9	Ruang Kesekretariatan	1	1	-	-
10	Ruang PP/JSP	1	1	-	-
11	Ruang Kasir	1	1	-	-
12	Ruang Bendahara	1	1	-	-
13	Ruang Posbakum	1	1	-	-
14	Ruang Server	1	1	-	-
15	Ruang Mediasi	1	1	-	-
16	Ruang PTSP	1	1	-	-
17	Ruang Rapat	1	1	-	-
18	Ruang Arsip Perkara	1	1	-	-

19	Ruang Arsip Umum	1	1	-	-
20	Ruang Perpustakaan	1	1	-	-
21	Ruang Tamu	1	1	-	-
22	Ruang Musholla	1	1	-	-
23	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	1	1	-	-
24	Ruang Tunggu Sidang	1	1	-	-
25	Ruang Tunggu Mediasi	1	1	-	-
26	Ruang Tunggu PTSP	1	1	-	-
27	Pos Satuan Pengamanan	1	1	-	-
28	Ruang Gudang	1	1	-	-
<b>II</b>	<b>Sarana /Prasarana Fasilitas</b>				
1.	Lemari Besi	30	30	-	-
2.	Lemari Kayu	26	16	-	10
3.	Rak Besi	10	7	-	3
4.	Rak Kayu	13	10	-	3
5.	Filling Cabinet Besi	7	5	-	2
6.	Brankas	2	2	-	-
7.	Lemari Display	1	1	-	-
8.	Tabung Pemadam Api	2	2	-	-
9.	CCTV	1	1	-	-
10.	Papan Visual	19	10	-	9
11.	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-
12.	Mesin Absensi	2	1	-	1
13.	LCD Proyektor	1	1	-	-
14.	Teralis	1	1	-	-
15.	Meja Kerja Kayu	56	41	-	15
16.	Kursi Besi/ Metal	74	63	-	13
17.	Kursi Kayu	34	8	-	26
18.	Sice	7	4	-	3
19.	Bangku Panjang Kayu	5	2	-	3
20.	Meja Rapat	4	2	-	2
21.	Meja Komputer	7	4	-	3
22.	Meja Telepon	1	1	-	-
23.	Meja Resepsionis	1	1	-	-
24.	Kursi Fiberglass/Plastik	10	-	-	10
25.	Jam Elektronik	4	2	-	2
26.	AC Split	15	12	-	3
27.	Kipas Angin	7	3	-	4
28.	Kitchen Set	1	1	-	-
29.	Tandon Air	1	1	-	-
30.	Televisi	6	3	-	3
31.	Sound System	1	-	-	1

32.	Stabilisator	6	4	-	2
33.	Lambang Garuda Pancasila	3	3	-	-
34.	Tiang Bendera	5	2	-	3
35.	Kaca Hias	17	15	-	2
36.	Dispenser	5	4	-	1
37.	Mimbar/ Podium	4	4	-	-
38.	Palu Sidang	1	1	-	-
39.	Lambang Instansi	3	2	-	1
40.	HandyCam	1	1	-	-
41.	Karpet	1	1	-	-
42.	Gordyn/Kray	16	16	-	-
43.	UPS	5	4	-	1
44.	Camera Digital	1	1	-	-
45.	LCD Monitor	1	1	-	-
46.	PABX	1	1	-	-
47.	Pesawat Telepon	17	16	-	1
48.	Faksimile	1	-	-	1
49.	Scanner	2	2	-	-
50.	Genset	2	1	-	1
51.	PC Unit	23	18	-	5
52.	Laptop	17	13	-	4
53.	Printer	26	10	-	16
54.	Server	2	1	-	1
55.	Router	1	1	-	-
56.	Portable Hardisk	2	-	-	2
57.	Rak Server	1	1	-	-

Selain sarana dan prasarana yang ada saat ini di Pengadilan Agama Maumere yang terdaftar dalam Barang Milik Negara (BMN), di tahun 2020 Pengadilan Agama Maumere melakukan pengadaan Tambahan alat pengolah data pendung Pc All in untuk Kepaniteraan, serta mesin Fotocopy dengan status pinjam pakai dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel . 44.Sarana dan prasarana Kantor PA. Maumere

No	Uraian Jenis Barang/Alat	Tanggal/ Tahun Perolehan	Kondisi			Status Perolehan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	PC	29-04-2020	√			Pembelian Satker

2	Mobil Expander	05-06-2020	√			Pinjam Pakai
3	Mesin Fotocopy	16-03-2020	√			Pinjam Pakai

**2. Matriks Barang Milik Negara**

**a. Kendaraan Dinas**

Sebagai sarana penunjang kerja serta untuk memperlancar operasional aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Maumere memiliki 7 buah kendaraan dinas yang dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel . 45.Matriks BMN PA. Maumere Tahun 2020

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1	Toyota Innova	2007	√			
2	Suzuki APV Arena	2011	√			
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1	Suzuki Satria RU 120	2000			√	
2	Supra Fit NF 100 SL	2006	√			
3	Karisma X 125 D NF 125 D	2006	√			
4	Supra X 125 D NF 125 D	2005	√			
5	Suzuki Thunder	2007	√			

**b. Rumah Dinas dan Mess Pegawai**

Pengadilan Agama Maumere memiliki sebuah rumah dinas yang diperuntukan bagi Ketua PA, jenis bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen tahun perolehan 2010 yang beralamat di Jl. Wairklau No. 60, Madawat, Maumere. Sedangkan yang menjadi Mess Pegawai merupakan Gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Maumere yang beralamat di Jl. Wairklau No. 56, Madawat Maumere. Alih fungsi gedung kantor lama ini didasarkan pada SK. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 740/SEK/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Alih Fungsi

Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Gedung Kantor Pengadilan Agama Maumere Yang Lama Menjadi Tanah Dan/Atau Bangunan Mess. Lengkapnya dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel . 46.Rumah dinas dan Mess pegawai PA. Maumere

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Rumah Dinas</b>					
1	Rumah Dinas Ketua	1	✓			
<b>II</b>	<b>Mess Pegawai</b>					
1	Mess Pegawai	1	✓			

**3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana**

**a. Pengadaan Sarana Pengadilan Agama Maumere**

Untuk menunjang kinerja aparat peradilan dan kelancaran dalam pelayanan kepada para pihak pencari keadilan pada tahun 2020, Pengadilan Agama Maumere mendapatkan alokasi belanja modal untuk Pengadaan Alat Pengolah Data Penunjang SIPP berupa dua (2) buah PC All in untuk Kepaniteraan dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000.

**b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Maumere yang disediakan dalam DIPA tahun Anggaran 2020 meliputi pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan sertamesin dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:

Tabel . 47.Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kantor PA. Maumere

No	Jenis Belanja Barang	Pagu Anggaran	Rincian Pemeliharaan	Realisasi Anggaran
1	Pemeliharaan Gedung dan	Rp. 112.980.000	Perawatan Gedung dan	Rp. 112.795.00

	Bangunan		Halaman Kantor	
2	Pemeliharaan	Rp. 1.500.000	- Genset	Rp.0
	Peralatan dan Mesin	Rp. 7.000.000	- PC	Rp.6.891.000
		Rp. 5.600.000	- Laptop	Rp.5.575.000
		Rp. 14.320.000	- Roda 2	Rp.12.300.500
		Rp.6.600.000	- Printer	Rp. 6.600.000
		Rp. 7.200.000	- AC	Rp.5.220.000
		Rp. 45.400.200	- Roda 4	Rp. 41.959.500
		Rp.4.850.000	- BBM Roda 4	Rp. 3.776.000
			- Bahan Bakar	
		Rp. 2.400.000	Genset	Rp . 2.90.000

**c. Alih Fungsi dan Penghapusan BMN**

Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Maumere telah menerima SK. alih fungsi tanah dan/atau gedung Kantor Lama sesuai SK. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 740/SEK/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Dan/ Atau Gedung Kantor Pengadilan Agama Maumere Yang Lama Menjadi Tanah Dan/ Atau Bangunan Mess. Sedangkan untuk Penghapusan Barang Milik Negara untuk Tahun 2020 Pengadilan Agama Maumere belum melaksanakan.

**4. Administrasi Tata Persuratan**

Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Maumere telah mengelola surat masuk sebanyak 311 surat sedangkan surat keluar sebanyak 850 surat. Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar sesuai dengan kode klasifikasi selama tahun 2020 sebagai berikut :

**a. Surat Masuk**

Tabel . 48. Surat Masuk PA. Maumere Tahun 2020

Bulan	KP	KU	PL	PP	PB	PS	OT	KS	HM	HK	Jumlah
Januari	12	3	3	1	2	1	1	2	9	2	35
Pebruari	6	5	-	1	-	-	2	-	10	3	27

Maret	19	9	-	1	1	1	4	1	16	4	54
April	4	7	1	1	-	1	3	-	7	7	30
Mei	8	2	-	1	-	4	1	-	6	3	25
Juni	2	6	1	1	-	-	2	-	6	3	22
Juli	14	1	4	1	-	-	4	-	3	1	28
Agustus	5	2	1	-	-	-	2	-	7	5	22
September	8	-	-	-	-	-	3	-	2	2	15
Oktober	10	1	-	1	-	-	2	-	3	-	17
Nopember	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	12
Desember	10	-	-	-	-	-	5	-	6	2	13
<b>Jumlah</b>											<b>311</b>

**b. Surat Keluar**

Tabel . 49.Surat Keluar PA. Maumere Tahun 2020

Bulan	KP	KU	PL	PP	PB	PS	OT	KS	HM	HK	Jumlah
Januari	171	15	36	1	1	-	7	1	7	8	247
Pebruari	39	18	3	-	-	-	7	-	5	7	79
Maret	24	9	4	-	-	-	4	-	3	9	63
April	45	9	3	-	-	-	8	-	7	10	82
Mei	6	10	-	-	-	-	5	-	3	3	27
Juni	14	10	3	-	-	-	4	-	5	1	37
Juli	27	12	3	1	-	1	6	-	3	3	56
Agustus	56	13	-	-	-	-	4	-	3	11	87
September	24	8	-	-	-	-	3	-	2	1	38
Oktober	21	11	-	-	-	-	4	-	1	6	45
Nopember	21	8	-	-	-	-	3	-	2	4	38
Desember	31	9	-	-	-	-	8	-	2	2	32
<b>Jumlah</b>											<b>850</b>

**C. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP**

**- Implementasi E-Courtdi Lingkungan Peradilan Agama**

*E-Court* atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara

Elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, pengguna yang dapat beracara menggunakan *e-Court* hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari keluarnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu *e-Litigation* (persidangan secara elektronik). Dengan penambahan fitur yang telah mencakup *e-Filing* (Pendaftaran perkara), *e-Payment* (pembayaran), dan *e-Summons* (Pemanggilan). Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, pengguna *e-Court* akan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Untuk Pengguna Lain, akun didapatkan melalui meja *e-Court* atau Pojok *e-Court* pada setiap pengadilan.

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang dituntut untuk segera melaksanakan amanah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Sebagai wujud nyata Pengadilan Agama Maumere telah melakukan suatu upaya Sosialisasi *E-Court* kepada para Pengacara/Advokat di Wilayah Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Maumere, dan juga kepada Pejabat kepaniteraan serta Petugas PTSP Kepaniteraan. Selain pelaksanaan sosialisasi, Pengadilan Agama Maumere juga telah menyediakan sarana dan

prasaranapendukung antara lain Pojok *E-Court* dan Penunjukan Petugas *E-Court* yang terintegrasi dengan pelayanan PTSP Pengadilan Agama Maumere sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua pengadilan Agama Maumere Nomor : W23-A9/ 735 /KP.00.3/SK/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019,hal ini guna mendukung implementasi pelayanan perkara secara *E-Court* yang maksimal demi mewujudkan dan meningkatkan kepuasan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam kurun waktu tahun 2020 Pengadilan Agama Maumere telah menerima sebanyak 14 (empat belas) perkara melalui *E-Court* dan penerimaan perkara ini juga telah di laporkan kepada Badan Peradilan Agama secara berjenjang melalui Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

**Gambar 9. Sarana dan prasarana pendukung E-Court PA. Maumere**



**- Implementasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama**

Untuk menjamin pelaksanaan Administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel. Mahkamah Agung menerapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi Pengadilan yang bersifat manual (konvensional) beralih ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi. Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi yang memadai tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi untuk Lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan. Begitu juga Sumber Daya Manusia yang

ada harus terampil dalam mengoperasikannya. Salah satu aplikasi penunjang yang terintegrasi oleh Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan Teknologi Informasi adalah penerapan aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Versi 4.0.1 yang pelaksanaan update terakhir di tahun 2020,hal ini menjadi media pendukung yang digunakan pada Pengadilan Agama Maumere dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Pada tahun 2020 juga Pengadilan Agama Maumere menerima alokasi anggaran pengadaan alat pengolah data (PC) sebagai pendukung SIPP untuk Kepaniteraan yang telah di realisasikan sebagai pendukung optimalisasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang digunakan dalam Pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Maumere.

Sistem pelayanan yang dilakukan pada aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) antara lain sebagai berikut :

1. Pendaftaran perkara;
2. Register Perkara Gugatan dan Permohonan
3. Jurnal Keuangan Perkara Gugatan dan Permohonan
4. Pembuatan PMH;
5. Pembuatan Penunjukan PP
6. Pembuatan Penunjukan Jurusita /JSP
7. Pembuatan PHS;
8. Jadwal Sidang;
9. Relas Panggilan/Tabayun;
10. Berita Acara Sidang;
11. Penundaan Sidang;
12. Mediasi;
13. Putusan/Penetapan;
14. Pemberitahuan Putusan;
15. Minutasi. Dll.

Gambar . 10. Screenshot Aplikasi SIPP PA. Maumere Tahun 2020



Adapun perangkat keras(*hardware*) yang dimiliki Pengadilan Agama Maumere sebagai pendukung optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) saat ini adalah :

1. Pc.8 unit;
2. Laptop 5 unit;
3. TV Monitor 2 unit;
4. Printer 5 unit;
5. Server 2 unit; dan

6. Perangkat jaringan 4 unit.

Berdasarkan hasil rapor penilaian penyelesaian perkara yang di rilis oleh Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI pertanggal 14 Desember 2020 Pengadilan Agama Maumere mendapatkan nilai capaian penyelesaian perkara sebesar 98,14%. Semoga dengan capaian ini tidak menurunkan semangat bagi seluruh aparaturnya terkait dalam mengoptimalkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), bahkan semoga menjadi spirit untuk dapat lebih meningkatkan kinerja sehingga mampu memberikan capaian penyelesaian perkara yang lebih baik lagi.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Gambar . 11. Sertifikat APM PA. Maumere



Salah satu bentuk inovasi Badan peradilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pelaksanaan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dulunya adalah program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM).

Di pertengahan tahun 2020 Pengadilan Agama Maumere mengalami adanya masa transisi, karena adanya mutasi Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Peradilan Agama maka berimplikasi pada susunan struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Pengadilan Agama Maumere,

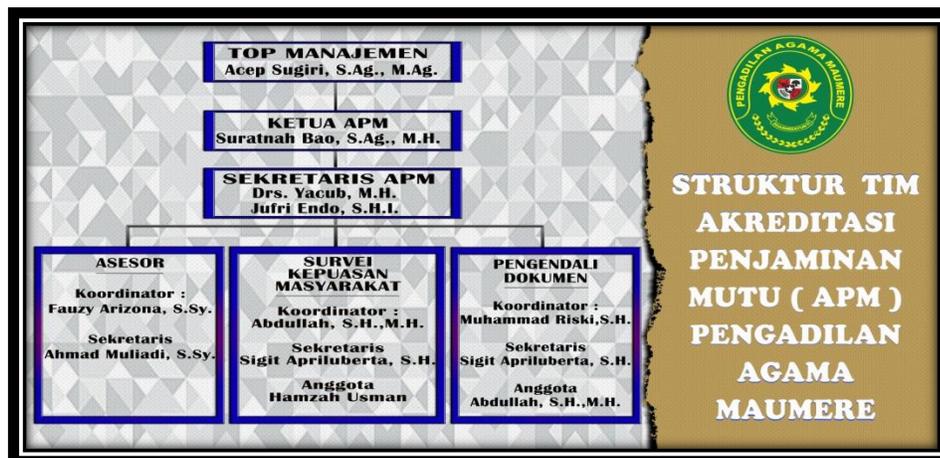
karena baik unsur Pimpinan maupun Hakim terjadi perubahan, sehingga perlu menetapkan kembali struktur baru Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor W23-A9/622/kp.00.3/SK/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 dengan Susunan Sebagai berikut :

Tabel. 50. Susunan Tim APM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	4	5
1	Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. 19730804 200112 1 003	Ketua	Top Manajemen
2	Suratnah Bao, S.Ag, M.H. 19740301.200604.2.001	Wakil Ketua	Ketua APM

3	Drs. Yacub, M.H. 19660718.199903.1.001	Panitera	Sekretaris Akreditasi
4	Jufri Endo, S.H.I 197104211996031002	Sekretaris	Sekretaris Akreditasi
5	Fauzy Arizona, S.Sy 198806262017121003	Hakim Pratama Madya	Koordinator Asesor Internal
6	Ahmad Muliadi.S.Sy 199211022017121002	Hakim Pratama Madya	Sekretaris
7	Muhammad Rizki 198408162011011006	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	Koordinator Pengendali Dokumen APM
8	Sigit Apriluberta, S.H 198204262006041004	Panmud Permohonan	Sekretaris
9	Abdullah, S.H, M.H 19700608.200312.1.002	Panmud Hukum	Anggota
10	Abdullah, S.H., M.H 19700608.200312.1.002	Panmud Hukum	Koordinator Survey Kepuasan Masyarakat
11	Sigit Apriluberta, S.H 198204262006041004	Panmud Permohonan	Sekretaris
12	Hamzah Usman	Jurusita	Anggota

Gambar 12. Foto Struktur Tim APM PA. Maumere Tahun 2020



Tantangan baru dari sebuah restorasi implemmentasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tidak mengikat hanya pada kelengkapan dokumen serta sarana dan prasarana semata, tetapi hal yang menjadi mendasar adalah implementasi

pelaksanaan tupoksi sesuai regulasi dan Standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, khususnya pada wilayah Pelayanan masyarakat pencari keadilan dan pelaksanaan *Job Description* masing-masing aparaturnya Pengadilan Agama Maumere.

Pengadilan Agama Maumere Juga telah melaksanakan *Asesmen Surveillance* Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 20 Oktober 2020, Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Nusa Tenggara Timur Nomor W23-A/1566/HM.00/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan *Asesmen Surveillance* Pertama APM dengan menunjuk Tim *Asesmen Surveillance* eksternal Pengadilan Agama Maumere sebagai berikut :

**Tabel. 51. Bagan nama Tim Asessor Eksternal Pengadilan Agama Maumere**

No	Nama Asessor Eksternal	Pendamping
1	Nurhayati Lembang Ama, S.Kom(Kasubbag Kepegawaian dan IT PTA. NTT)	Dra. Ummi Kalsum (Panitera Pengganti PTA. NTT)

Dan setelah melewati beberapa tahapan baik pada saat *opening meeting*, pemeriksaan eviden maupun interview secara langsung pada masing-masing tupoksi stekholder mengenai implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Maumere maupun sampai tahap *closing meeting* dengan berjalan aman dan lancar, diakhir pelaksanaan *Asesmen Surveillance* sekaligus dirangkaikan penyerahan Kontrak Kerja dari Ketua Tim *Asesmen Surveillance* kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere.

*Gambar. 13. Foto Pelaksanaan Kegiatan "Opening Meeting Asesmen Surveillance Pertama APM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020"*





*Gambar 14. Foto Pelaksanaan Kegiatan "Closing Meeting Asesmen Surveillance Pertama APM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019*



*Gambar 15. Foto Pelaksanaan Penyerahan Kontrak Kerja dari Ketua Tim Asesmen Surveillance kepada Ketua PA. Maumere*



*Gambar 16. Foto Bersama Tim Asesmen Surveillance bersama Keluarga besar PA. Maumere*

Seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere sangat berharap semoga hasil Asesmen Surveillancedapar dicapai dengan sangat memuaskan, sehingga di pengujung akhir bulan Oktober tibalah saat yang sangat dinanti dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillahrabbi alaminberdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 perihal Hasil Penilaian Akreditasi penjaminan Mutu Tahun 2020 menjawab sebuah usaha dan perjuangan bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere, karena Pengadilan Agama Maumere kembali mengukir prestasi dengan kembali mendapatkan nilai predikat **"A" Excellent**, hal ini menjadi bukti komitmen dan kerja keras seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere, semoga capaian ini dapat dipertahankan dan menjadi spirit energi dalam meningkatkan kinerja aparaturnya serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan

*Gambar 17. Foto Lampiran SK. Dirjen Badilag MA RI tentang Hasil APM Tahun 2020*

<p>Lampiran      Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama/ Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 Tanggal: 30 November 2020</p> <p>PENETAPAN HASIL ASSESSMENT SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2020</p>				
NO.	UNIT KERJA	KELAS	PREDIKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10	PA MAUMERE	II	A (Excellent)	TETAP
11	PA RUTENG	II	A (Excellent)	NAIK
12	PA SOE	II	A (Excellent)	TETAP
13	PA WAIKABUBAK	II	A (Excellent)	TETAP
14	PA WAINGAPU	II	A (Excellent)	NAIK

Dalam mendukung pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang lebih optimal di Pengadilan Agama Maumere, aparaturnya Pengadilan Agama Maumere mewujudkan komitmen pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana telah dilakukan Pencanangan Zona Integritas dan Penandatanganan Komitmen Bersama yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018. Demi memenuhi konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Maumere telah berusaha dengan segala kemampuan memenuhi baik sarana dan prasarana sebagai pendukung terlaksananya implementasi Pembangunan Zona Integritas dari 6 (enam) area yang terdiri :

1. Manajemen Perubahan (Pola pikir)

Diwujudkan dengan Peningkatan pembinaan dan evaluasi secara berjenjang bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere baik yang

dilakukan saat pelaksanaan upacara/apel juga saat rapat berkara serta memaksimalkan fungsi dan peranan Role Model dan Agen Perubahan;

2. Penataan Tata Laksana;

Penataan Tata Laksana diwujudkan dengan optimalisasi pelaksanaan kinerja aparatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan *Job Description* yang telah ditetapkan serta berusaha menempatkan sumber daya aparatur sesuai dengan disiplin ilmu yang miliki sehingga menciptakan korelasidalam mewujudkan capaian kinerja yang sesuai dengan rencana strategis dan Visi Misi Pengadilan Agama Maumere.

3. Peningkatan Kualitas SDM;

Peningkatan Kualitas SDM diwujudkan dengan mengikutsertakan aparatur dalam Diklat Penjenjangan seperti PIM IV yang telah diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Agama Maumere dan Diklat Bendahara yang telah diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Maumere, serta meningkatkan kegiatan DDTK bidang kepaniteraan seperti SIPP, E-Court, 11 (sebelas) inovasi unggulan Dirjen Badilag serta E-Litigasi Mahkamah Agung, dan Bidang Kesekretariatan yaitu DDTK aplikasi Surat dan Aplikasi Notifikasi Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat.Peningkatan kualitas SDM ini diharapkan mampu membawa perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan baik secara internal maupun bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Akuntabilitas Kinerja;

Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian yang menjadi tolak ukur dalam terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang transparan dan akuntabel, baik dalam pelayanan Informasi, Pengaduan juga terhadap akses media elektronik lainnya serta pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Maumere diwujudkan dengan tersedianya media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti Website yang selalu di update baik konten maupun berita, Banner-banner, brosur, majalah peradilan yang tersedia di ruang tunggu PTSP dan Ruang tunggu Sidang serta formulir permintaan informasi yang telah disediakan di meja PTSP pelayanan informasi, hal ini

sebagai implemmentasi dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

5. Pengawasan; dan

Pengawasan diwujudkan dengan pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawasan Bidang (HAWASBID) secara berkala sesuai jadwal pelaksanaan yang ditetapkan, dan juga hasil pengawasan telah disampaikan kepada seluruh pejabat terkait dan telah tindaklanjuti semua dari hasil temuan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil tindaklanjuti Hakim pengawas Bidang (HAWASBID), hal ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kinerja berjalan dengan baik.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Maumere adalah hal yang paling penting yang menjadi skala prioritas, dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Pengadilan Agama Maumere mewujudkan dengan meningkatkan fungsi dan peranan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penerimaan perkara secara elektronik (E-Court), 11 (sebelas) Inovasi Dirjen Badilag, E-Litigasi, Pelayanan dana prodeo yang optimal dan sidang keliling bagi masyarakat kurang mampu serta Pos Layanan Hukum, dengan menerapkan prinsip pelayanan dengan 3 S (Senyum, Salam dan Sapa) dan 5 R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin*), program ini sangat memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat karena telah memberikan akses kemudahan berperkara di pengadilan Agama Maumere dengan asas Sederhana, cepat dan biaya ringan;

Dari implementasi pelaksanaan Zona Integritas Pengadilan Agama Maumere berdasarkan hasil Assesmen Surveillance dari Asessor Eksternal yang dilaksanakan pada Tanggal 25 s.d. 28 Juni 2019 dan sesuai dengan Lembar kerja Evaluasi (LKE), maka Pengadilan Agama Maumere mendapatkan nilai 87,95. Nilai yang baik ini akan menjadi spirit dan motivasi bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere. Tim Asessor Internal juga secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sehingga meminimalisir hal-hal menjadi kendala yang dapat menghambat pelaksanaan zona

integritas serta memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi, hal ini menjadi bukti komitmen yang sungguh-sungguh oleh seluruh aparaturnya tentang pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di pengadilan Agama Maumere diharapkan semoga selalu berjalan dengan baik dan terukur, sehingga menjadikan Pengadilan Agama Maumere menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM).

**Gambar 18. Foto Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM**



**Gambar 19. Foto Piagam Pencanangan dan Komitmen Bersama Zona Integritas**



**- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Peradilan

Agama, maka Ketua Pengadilan Agama Maumere tidak menunggu lama dan langsung mengambil langkah kongkrit dengan mengintruksikan Kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Maumere untuk segera menindaklanjuti permintaan surat Dirjen Badan Peradilan Agama baik perencanaan maupun penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan Standar yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, sehingga pada bulan Januari 2019 sarana dan Prasarana pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada pengadilan Agama Maumere telah selesai dibuat dan dapat digunakan untuk pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, walaupun dalam kenyataan masih belum secara optimal karena ada dua komponen pendukung yaitu Petugas Bank BRI Cabang Maumere dan petugas PT. POS Cabang Maumere belum dapat tersedia dalam pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Maumere, sehingga masyarakat masih melakukan pembayaran dan Cap Pos secara manual di kantor Masing-masing. Belum tersediannya petugas Bank BRI dan petugas PT. POS dikarenakan masih menunggu kontrak Kerja yang sementara masih tahap kajian oleh masing-masing Pimpinan baik pihak Bank BRI Cabang Maumere maupun pihak PT. POS Cabang Maumere.

Namun dengan keterbatasan dan kekurangan komponen pendukung tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Petuags PTSP Pengadilan Agama Maumere kepada masyarakat pencari keadilan. Karena Pengadilan Agama Maumere selalu berupaya secara optimal mewujudkan pelayanan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menerapkan 3 S (Senyum, Salam dan Sapa) dan 5 R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin*).

Gambar 20. Foto Sarana dan Petugas PTSP PA. Maumere



- **Inovasi Pelayanan Publik**

Sejak 11 (sebelas) aplikasi inovasi Badan Peradilan Agama di uji coba berdasarkan sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1517/DJA/HM.00/4/2020 tanggal 22 April 2020, maka sejak saat itu seluruh Pengadilan Agama wajib melaksanakan 11(sebelas) aplikasi inovasi Badilag tersebut yang terdiri dari:

a. Aplikasi Antrian sidang;

Fungsi aplikasi ini adalah menyediakan pendaftaran antrian secara online dan memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhannya;

b. Aplikasi Informasi Perkara dan Produk Pengadilan ;

Fungsi aplikasi ini adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada para pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak;

c. Aplikasi Notifikasi perkara

Fungsi aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada para pihak yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara;

d. Aplikasi *E-Keuangan*;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara, pencetakan buku-buku keuangan dan saran pelaporan keuangan perkara.

e. Aplikasi *E-Register*;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai salah satu sarana validasi data SIPP satuan kerja dan sebagai saran pencetakan buku-buku register sesuai pola bindalmin;

f. CommandCenter.

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai pusat kontrol data manajemen peradilan agama sehingga mampu mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan ruangan khusus dengan berbagai peralatan

khusus serta menjadi pusat pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan realtime.

g. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin dan sebagai salah satu bukti bahwa seseorang masuk dalam daftar penduduk miskin berdasarkan basis data terpadu dari pemerintah;

h. Aplikasi PNBP fungsional;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai pencatatan PNBP secara lengkap mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, juga sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan PNBP fungsional ke kas Negara dalam tahun berjalan serta sebagai pengukuran kinerja Kasir dan Bendahara penerimaan.

i. Aplikasi *E-Examinasi*;

Fungsi aplikasi ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme Hakim, baik dari segi teknis yuridis maupun administrasi perkara serta sebagai bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukm materil dan formil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara;

j. Validasi Akta Cerai;

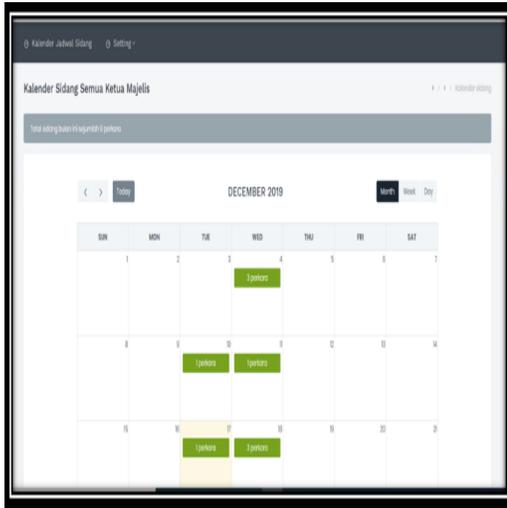
Fungsi Aplikasi ini adalah Sebagai sarana untuk memverikasi keaslian Akte Cerai yang dipegang oleh para pencari keadilan

k. Gugatan Mandiri;

Fungsi Aplikasi ini adalah Sebagai sarana untuk memudahkan para pencari keadilan dalam pembuatan gugatan secara mandiri.

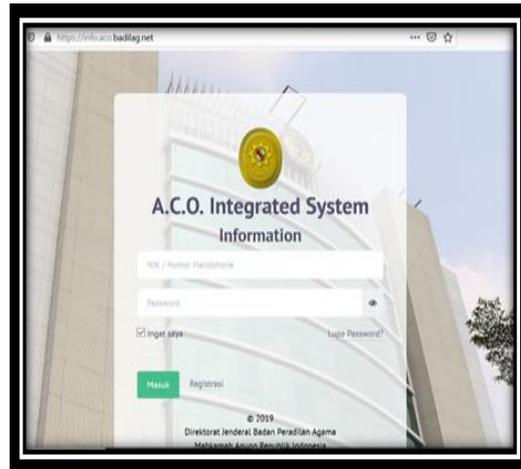
Dari 11 (sebelas) aplikasi inovasi Badilag tersebut seluruhnya telah di implementasikan di Pengadilan Agama Maumere, walaupun ada beberapa aplikasi yang masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat lebih optimal implementasi aplikasi tersebut dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Maumere telah melaporkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Pengadilan Tinggi

Agama Kupangtentang implementasi 11 (sebelas) aplikasi inovasi Badan Peradilan Agama.



**Gambar 21. Tampilan Aplikasi Antrian Sidang PA. Maumere**

**Gambar 22. Tampilan Aplikasi Informasi Produk Pengadilan PA. Maumere**



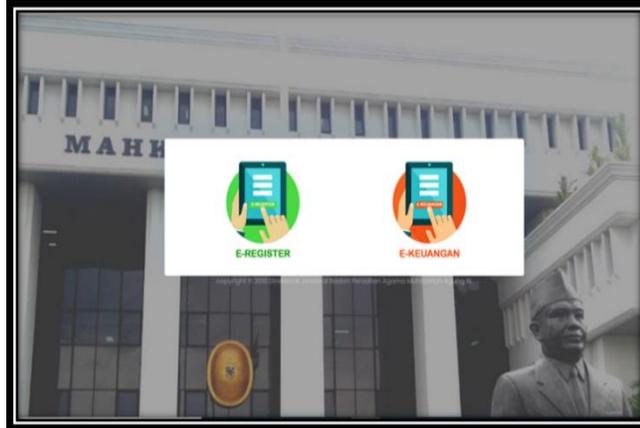
**Gambar 23. Tampilan Aplikasi Notifikasi Perkara PA. Maumere**

Sistem SMS dan Notifikasi Perkara

SMS Permisian Info Perkara

Tanggal	Nama Pengirim	Peran
20-9-2019 08:15:42	+628129109847	Sidang 20/Pdt/2019/Pakar
20-9-2019 08:15:46	+628129109748	Kuargan 10/Pdt/2019/Pakar
20-9-2019 07:50	+628129109898	Kuargan perkara no 24/Pdt/2019/Pakar
20-9-2019 07:10	+628129109425	Kuargan 24/Pdt/2019/Pakar
20-9-2019 07:05:46	+6281291098847	Kuargan 22/Pdt/2019/Pakar
19-9-2019 10:32:25	+628129109833	Kuargan 20/Pdt/2019/Pakar
19-9-2019 10:5:08	+6281291098847	Kuargan 20/Pdt/2019/Pakar

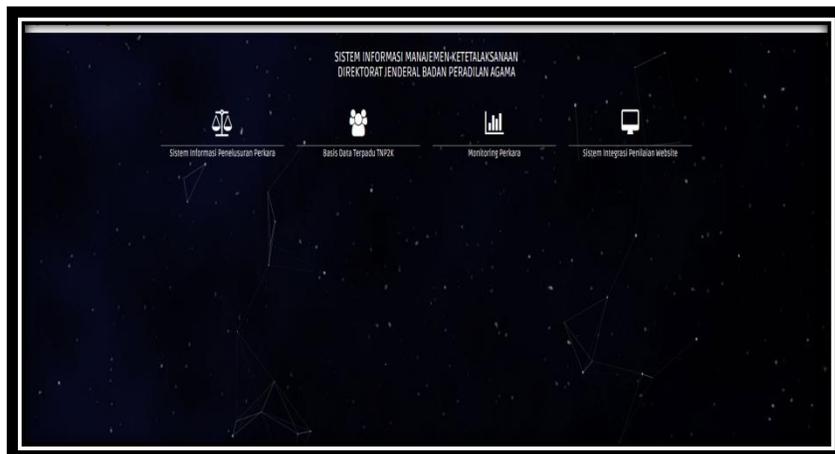
Gambar 24. Tampilan Aplikasi Aplikasi E-Register dan E-Keunagan PA. Maumere



Gambar 25. Tampilan Aplikasi Aplikasi PNBP Fungsional PA. Maumere



Gambar 26. Tampilan Aplikasi Basis Data Terpadu KemiskinanPA. Maumere



**Gambar 27. Tampilan Aplikasi Command Center PA. Maumere**



**APLIKASI PENGAMBILAN DAN LEGALISASI AKTA CERAI**

TAHUN CERAI: 2020

Show 10 entries Pencarian nomor AC/nomor perkara tahun di pilih: Sebelumnya Selanjutnya

Nomor AC	Tanggal AC	Nomor Seri AC	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Pihak	Tanggal Putus	Tanggal larir	Tanggal BHP	Tanggal diambil P	Tanggal diambil T	Aksi
0001/AC (2020)/Kukur	09-09-2020	Y 00070	54/Peris (2020)/Kukur	Ceraa Takak	Jumlah Bin lang maupun Nomin Tanggal BHP Tanggal	10-10-2020	09-09-2020	29-10-2020	09-09-2020		Photo Photo
Nomor AC	Tanggal AC	Nomor Seri AC	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Pihak	Tanggal Putus	Tanggal larir	Tanggal BHP	Tanggal diambil P	Tanggal diambil T	Aksi

Urutan (campai dari total) data akta cerai

**Gambar 28. Tampilan Aplikasi Validasi Akta Cerai PA. Maumere**

**Gugatan / Permohonan Mandiri**

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

**Sudah Siapkah Anda?**

Persiapkan Persyaratan, Data dan Informasi diri anda untuk memulai membuat Gugatan / Permohonan Secara Mandiri, ikuti setiap langkah yang akan disediakan oleh sistem.

[PROSEDUR BERPERKARA](#) [MULAI](#)

**Gambar 29. Tampilan Aplikasi Gugatan Mandiri PA. Maumere**

Pengadilan Agama Maumere juga selalu berusaha untuk berkarya dengan melahirkan inovasi-inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan baik bagi internal aparaturnya maupun demi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Pada Bulan Desember 2019 Pengadilan Agama Maumere juga mengeluarkan **Aplikasi Taksiran Panjar Biaya Perkara**. Aplikasi ini berplatform Excell yang dikombinasikan dengan Visual Basic. Tujuan aplikasi adalah memudahkan dalam menaksir panjar biaya perkara, baik bagi petugas maupun pihak/masyarakat yang akan mendaftarkan perkara. Aplikasi ini dapat menaksir jumlah panjar biaya untuk semua jenis perkara, baik gugatan maupun permohonan, baik penggugat/pemohonnya diketahui alamatnya maupun tidak. Aplikasi ini juga bisa untuk menaksir biaya perkara yang penggugat/pemohonnya berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere. Berikut ini adalah fitur dan tampilan aplikasi panjar biaya perkara.

Berikut tutorial dan tampilan aplikasi panjar biaya perkara

**Gambar 30. Tampilan Awal aplikasi taksir panjar biaya perkara**

**Tampilan Awal**



Fitur:

1. Sangat mudah digunakan (*user friendly*) karena dapat digunakan oleh siapa saja tanpa syarat kualifikasi pendidikan

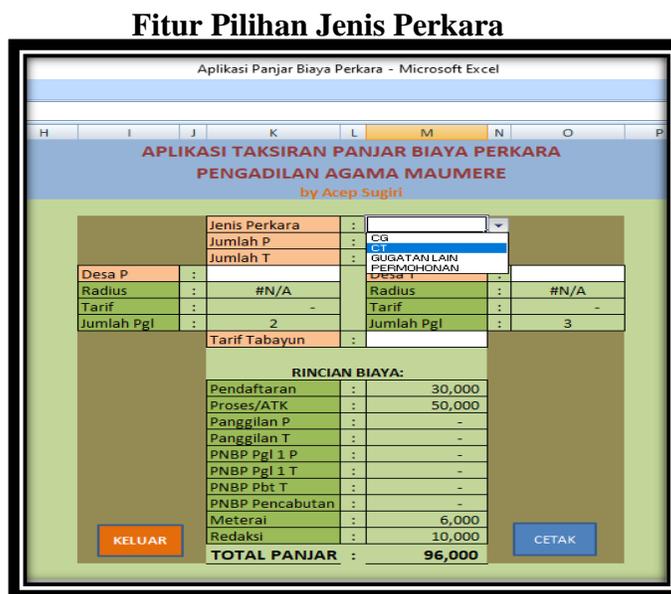
2. Aplikasi ini memiliki 3 (tiga) fitur utama, yaitu: Input Data, Cetak, dan Keluar
  - a. Input Data
 

Untuk memperoleh besaran taksiran panjar biaya perkara secara valid, pengguna (*user*) hanya perlu memasukkan 3 data: Jenis Perkara, Jumlah Pihak, dan nama Desa, yang semuanya sudah tersedia di dalam Aplikasi, sehingga pengguna hanya perlu klik dan pilih pada kolom yang disediakan.
  - b. Cetak
 

Setelah data yang diperlukan diinput, total dan rincian biaya langsung bisa terlihat dibagian bawah aplikasi. Sekalipun demikian, pengguna yang ingin mencetak halis taksiran hanya perlu mengklik tombol “CETAK”, dan aplikasi akan otomatis mencetak slip taksiran panjar biaya perkara.
  - c. Keluar
 

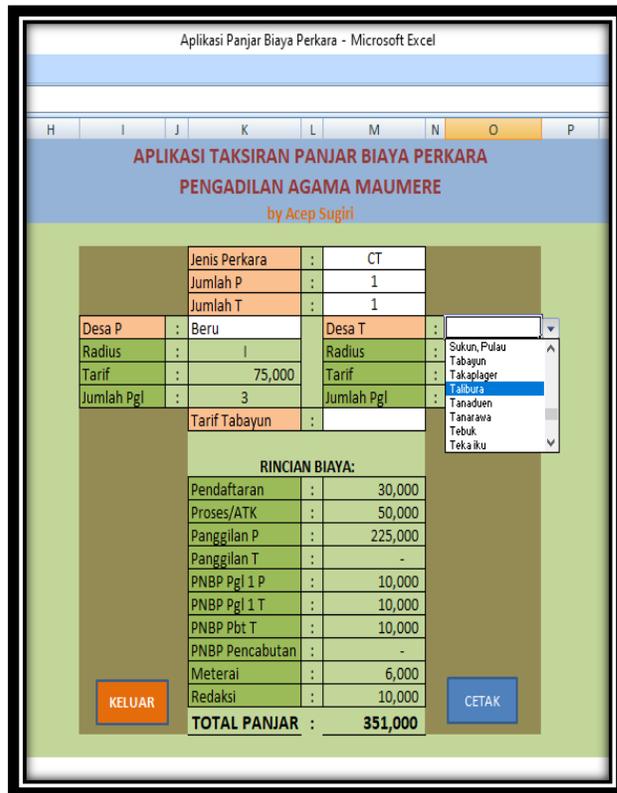
Pengguna yang telah selesai menggunakan aplikasi dapat mengklik tombol “KELUAR” untuk mengakhiri atau menutup aplikasi.

Gambar 31. Tampilan Pilihan jenis perkara aplikasi taksir panjar biaya perkara



Gambar 32. Pilihan Desa aplikasi taksir panjar biaya perkara

Fitur Pilihan Desa (Alamat)



Gambar 33. Pilihan Desa aplikasi taksir panjar biaya perkara

Fitur Cetak Slip Taksiran Panjar



Aplikasi ini sudah disosialisasikan oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere selaku penggagas dan pembuat aplikasi tersebut kepada para Hakim, Pejabat Kepaniteraan, dan Petugas PTSP. Meskipun masih bersifat sederhana, Aplikasi ini sangat membantu khususnya para pencari keadilan karena hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat nilai taksir panjar biaya perkara dapat diketahui dan dicetak. Untuk sementara aplikasi ini baru digunakan dalam internal Pengadilan Agama Maumere, karena masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan dengan fitur yang lebih lengkap, seperti taksiran biaya banding, kasasi, PK, sita, pemeriksaan setempat (PS), dan eksekusi. Setelah fitur-fitur tersebut dilengkapi, Ketua Pengadilan Agama Maumere menargetkan aplikasi tersebut dapat digunakan minimal untuk Pengadilan Agama di seluruh wilayah PTA Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Ketua Pengadilan Agama Maumere juga mengharapkan untuk ke depannya Aplikasi ini dapat dibuatkan versi onlinenya.

**Gambar 34. Foto Sosialisasi Aplikasi Panjar Biaya Perkara**



## BAB VI

## PENGAWASAN

**A. Internal**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas pokok dan fungsi dapat dijalankan sesuai rencana strategis serta aturan yang berlaku. Dalam hal Pengawasan Pengadilan Agama Maumere telah berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, dan KMA Nomor: 145/KMA/SK/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007. Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan kegiatan dimaksud, dimana dalam pelaksanaan Pengawasan tersebut yang menjadi Koordinator Pengawas adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere, dengan mengkoordinir seluruh Hakim yang menjadi Pengawas Bidang.

Inti dari sebuah pengawasan adalah pengendalian dimana pengendalian tersebut juga terdiri dari 2 (dua) aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Sehingga pengawasan harus dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh agar mampu menciptakan organisasi yang baik dan berkesinambungan.

**1. Pengawasan Melekat**

Dalam pengawassan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan refresif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien. Pada Pengadilan Agama Maumere, pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere secara berkala mengawasipelaksanaan tugas sehari-hari. Demikian juga pengawasan dilakukan melaluirapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Perma Nomor 8 tahun2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di LingkunganMahkamah Agung, maka yang bertanggungjawab untuk mengawasi danmembina Hakim dan PNS dalam satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama adalahKetua Pengadilan.Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang

maksimal, Ketua Pengadilan Agama Maumere telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap triwulan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Untuk lebih menguatkan peranan dan fungsi Pembinaan serta Pengawasan Bidang Ketua Pengadilan Agama Maumere telah membuat sebuah regulasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W23-A9/441/KP.00.3/SK/ 4/2020 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 yang susunannya sebagai berikut:

**Tabel . 51. Susunan Tim Hawasbid PA. Maumere**

NO	NAMA, NIP PANGKAT, GOLONGAN	JABATAN		KET
		DINAS	HAKIM PENGAWAS BIDANG	
1.	<b>Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.</b> 19730804 200112 1 003 Pembina, IV/a	Ketua /Hakim Madya Pratama	➤ Penasehat	
2.	<b>Suratnah Bao, S.Ag., M.H.</b> 19740301 200604 2 001 Penata Tk.I, III/d	Wakil Ketua	➤ Koordinator Pengawasan	
3.	<b>Isyhad Wira B, S.H.I., M.S.I.</b> 19801110 201101 1 004 Penata, III/c	Hakim Pratama Madya	➤ Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan	
4.	<b>Fauzy Arizona, S.Sy</b> 19880626.201712.1.003 Penata Muda, III/a	Hakim Pratama	➤ Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan	
5.	<b>Ahmad Muliadi, S.Sy.</b> 19921102.201712.1.002	Hakim Pratama	➤ Hakim Pengawas Bidang PTSP dan SIPP	

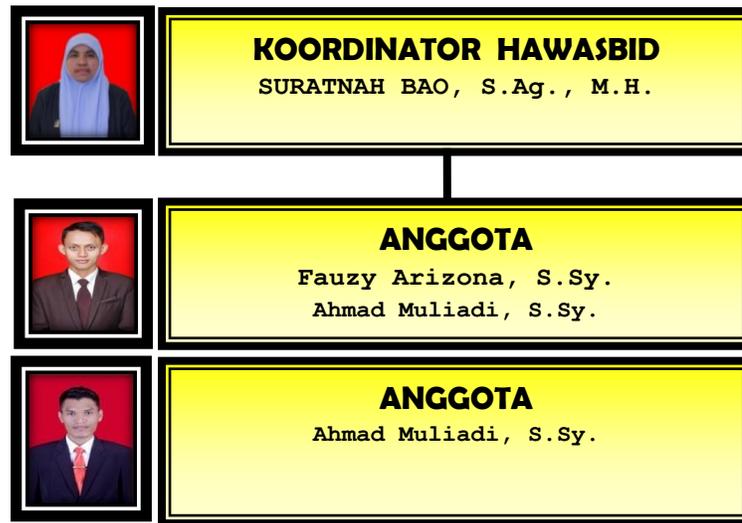
	PenataMuda, III/a		
--	-------------------	--	--

Kemudian karena adanya promosi dan mutasi Hakim Pengadilan Agama Maumere sehingga perlu dilaksanakan pembaharuan Susunan ataupun komposisi Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020 sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor:W23-A9/615/KP.00.3/SK/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Revisi Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020 yang susunannya adalah sebagai berikut :

**Tabel . 52. Susunan Revisi Tim Hawasbid PA. Maumere**

NO	NAMA, NIP PANGKAT, GOLONGAN	JABATAN	
		DINAS	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	<b>Suratnah Bao, S.Ag., M.H.</b> 19740301 200604 2 001 Penata Tk.I, III/d	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan & Pengawas Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik Pengawas Bidang Kepaniteraan
2.	<b>Fauzy Arizona, S.Sy.</b> 19880626.201712.1.003 PenataMuda, III/a	Hakim Pratama	(administrasi persidangan, administrasi perkara, dan keuangan perkara) Pengawas Bidang Kesekretariatan
3.	<b>Ahmad Muliadi, S.Sy.</b> 19921102.201712.1.002 PenataMuda, III/a	Hakim Pratama	(administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris, dan administrasi umum)

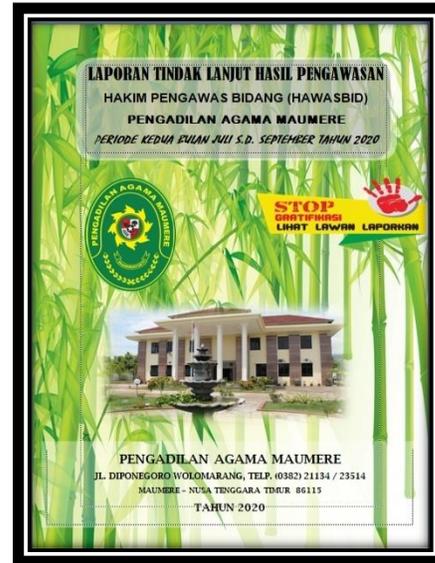
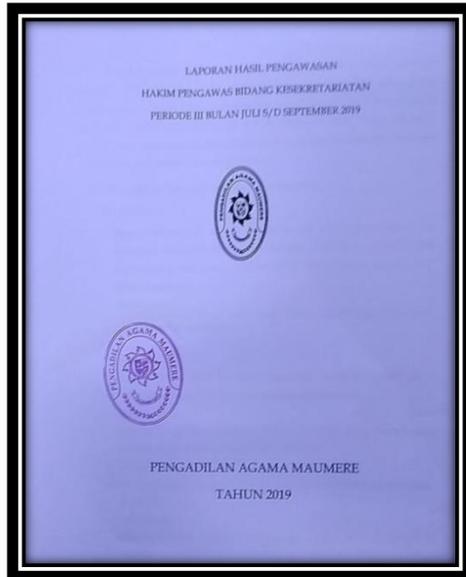
Tabel. 35. Bagan Tim Hawasbid PA. Maumere Tahun 2020



Pelaksanaan Pengawasan yang telah berjalan di Pengadilan Agama Maumere telah secara rutin/reguler sesuai dengan jadwal pengawasan yang berikan kepada masing-masing bidang.

Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinatori oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere sebagai penanggung jawab tugas-tugas yang dilaksanakan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Maumere dapat mempelajari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja Aparatur Peradilan yang dipimpinya.

Adapun selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2020, pada Pengadilan Agama Maumere telah dilakukan Pengawasan dan Pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidangselama 4 (empat) periode dan Hasil Pengawasan Hakim Pengawasan Bidang telah ditindaklanjuti seluruhnya pejabat terkaitbaik melalui laporan hasil tindaklanjut maupun dengan pelaksanaan yang membutuhkan *action* ataupun tindakan perubahan yang sifatnya segera semua telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta arahan dari Hakim Pengawas Bidang.



**Gambar 36. Laporan Hasil Pengawasan Bidang**      **Gambar. 41. Laporan Tindakan lanjut Hasil Pengawasan Bidang**

## 2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh pihak yang memahami substansi kerja objek yang diawasi dan ditunjuk khusus untuk melakukan audit independen terhadap objek yang diawasi, dalam hal ini pengawasan fungsional Pengadilan Agama Maumere dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Badan Pengawasan (Bawas) dari Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung. Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Maumere dalam tertib administrasi, organisasi finansial, peradilan, terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Maumere bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan hasilnya baik walaupun tentunya belum sempurna karena masih ada beberapa yang perlu adanya sedikit perbaikan dan pembaharuan, namun sebagai catatan diharapkan kedepan akan lebih disempurnakan sehingga mampu memenuhi target dan capaian yang

diinginkan sesuai dengan Rencana Strategis dan Program Kerja yang telah ditetapkan.

## **B. Evaluasi**

Untuk melihat hasil kinerja apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan maka dibutuhkan sebuah evaluasi yang progresif. Evaluasi hasil pengawasan dimaksudkan untuk melakukan tindakan perbaikan sistem manajemen maupun tata kelola serta pencegahan terhadap pelaksanaan kinerja yang tidak atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang secara periodik telah dilaksanakan dengan baik setiap triwulan (tiga bulan) sekali, hal ini disesuaikan dengan jadwal pembinaan dan pengawasan dari Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan (HATIBINWASDA) dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun. Hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid yang merupakan temuan, menjadi bahan bagi Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere (sebagai koordinator pengawasan) untuk menindaklanjuti dan menuangkan dalam sebuah Laporan Hasil Pengawasan Bidang dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere serta tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang cq. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang (Koordinator HATIBINWASDA) sebagai bahan evaluasi, dan juga hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Masing-masing kepada Panitera dan Sekretaris selaku penanggungjawab masing-masing bagian. Untuk segera menindaklanjuti dan membenahi segala hal yang menjadi temuan dan menuangkannya dalam bentuk laporan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Bidang, baik hal-hal yang menyangkut kepaniteraan maupun yang berkenaan dengan kesekretariatan.

Ada dua bidang evaluasi yang terkait yaitu :

### **b. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Perkara)**

- a. Evaluasi bidang Kepaniteraan yaitu dengan mengadakan rapat rutin dengan para Hakim, dengan Panitera Pengganti, serta rapat dengan Jurusita;
- b. Mengadakan Rapat, Sosialisasi dan DDTK kepada Tim SIPP, Petugas PTSP dan *E-Court*;
- c. Mengadakan rapat minimal 1 bulan sekali dengan seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere;

- d. Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
- c. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum)
  - a. Evaluasi bidang Kesekretariatan yaitu dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kasubag, petugas operator SIMAK BMN dan Operator SAKPA, Tim Teknologi Informasi, dan Pengelola Website;
  - b. Mengadakan rapat minimal 1 bulan sekali dengan seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere;
  - c. Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang.  
Pengadilan Agama Maumere telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :
    1. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Maumere perihal diterbitkannya implementasi dari terbitnya Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa kewajiban Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan dengan memberikan arahan dan pembinaan agar seluruh aparatur dalam tempat kerjanya tersebut tetap memiliki integritas disiplin kerja, mengindahkan kode etik baik hakim/PNS dan mempedomani perilaku yang baik, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.
    2. Peningkatan kedisiplinan aparatur Pengadilan Agama Maumere baik dalam hal disiplin Absensi jam masuk, Istrahat dan Pulang maupun disiplin pelaksanaan hasil kinerja;
    3. Mengadakan assessmen intenal sebagai upaya perbaikan terus-menerus terhadap terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dan tertibnya implementasi administrasi baik dibidang kepaniteraan maupun kesekretariatan.
    4. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
  - c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere untuk dievaluasi;
  - d. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam jajarannya dengan skala prioritas.

**BAB VII****PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan tugas pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada, walaupun secara realitas masih sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi baik dalam memenuhi pelayanan secara internal maupun pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan;
2. Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Zona Integritas diharapkan dapat mewujudkan Pengadilan Agama Maumere menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM), sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dan juga dengan harapan Pengadilan Agama Maumere mendapatkan kenaikan kelas dari Kelas II menjadi kelas 1 B.
3. Penyelesaian perkara tahun 2020 pada tingkat pertama telah diusahakan secara maksimal. Dari sisa tahun 2019 sebanyak 3 perkara, ditambah perkara yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 61 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak 63 perkara sehingga sisa perkara tahun 2020 sebanyak 1 perkara. terdapat kenaikan penerimaan perkara pada tahun 2020 yaitu sebanyak 61 dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 55, sehingga jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2020 mengalami kenaikan;
4. Dengan Implementasinya E-Letigasi Mahkamah Agung dan 11 (sebelas) aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama, sangat memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Maumere, khususnya dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, karena baik lembaga hukum maupun masyarakat sangat merasa terbantu dengan hadirnya pembaharuan

peradilan yang berbasis teknologi informasi sesuai dengan asas beracara di Pengadilan yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

5. Pagu Anggaran belanja Kantor Pengadilan Agama Maumere (402851) Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2020 setelah mengalami revisi-13 sebesar Rp. 2.650.819.000 (*Dua Miliar enam Ratus lima puluh Juta Delapan Ratus Sembilan belas Ribu Rupiah*) sedangkan anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 2.602.113.375 (*Dua milyar enam ratus dua juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) atau sebesar 98,16%. Terdapat sisa anggaran pada belanja gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 4.050.061 (*empat juta lima puluh ribu enam puluh satu rupiah*), belanja barang sebesar Rp. 43.524.600 (*empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah*) dan belanja modal sebesar Rp. 1.131.000 (*satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
6. Pagu Anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Maumere (402852) Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020 sebesar Rp. 60.320.000,- (*Enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.229.000,- (*Enam puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) atau sebesar 99,85 %.
7. Dengan adanya alokasi anggaran Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum sangat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, karena masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan hukum dan pelayanan perkara dengan secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang beradadikepulauan seperti Desa Pemana telah dilakukan sidang keliling 1 kali, Desa Pangabatang telah dilakukan sidang keliling 2 kali di tahun 2020 oleh Pengadilan Agama Maumere dalam sidang itsbat nikah serta perkara gugatan perceraian.
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas Peradilan selain dukungan sarana dan prasarana yang telah dijabarkan diatas, juga sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur pegawai Pengadilan Agama Maumere maupun pelaksanaan pelayanan

bagi masyarakat pencari keadilan karena dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Agama Maumere saat ini berdampak kepada adanya Pegawai yang merangkap Jabatan/pekerjaan pada bidang Kesekretariatan maupun pada bidang Kepaniteraan, hal ini tidak lain untuk memenuhi optimalisasi fungsi peradilan agar berjalan dengan baik dan lancar terlebih pada peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan;

9. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yudisial maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif karena adanya respon timbal balik sebagai wujud tindak lanjut dari hasil pengawasan bidang;
10. Pelaksanaan implementasi Teknologi Informasi dan transparansi peradilan sudah berjalan dengan baik dengan didukung website Pengadilan 1 Maumere yaitu *pa.maumere.go.id* yang selalu terupdate, aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan menggunakan versi terbaru 4.0.1, Komdanas, Sikep MARI, dan Aplikasi Backup Sikep (ABS), Direktori Putusan serta sistem Informasi Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah terintegrasi dengan Website Pengadilan Agama Maumere. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Maumere, juga terhubung dengan monitor pada ruang tunggu sidang pada Pengadilan Agama Maumere yang memudahkan masyarakat melihat jadwal sidang di Pengadilan Agama Maumere serta Aplikasi Keuangan (SAKTI) yang telah disosialisasikan oleh Kementerian Keuangan dan akan dioptimalisasikan di Tahun 2020 mendatang.

#### **B. Rekomendasi**

1. Agar Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Agama dapat lebih meningkatkan optimalisasi fungsi aplikasi yang telah di launching untuk digunakan pada satuan kerja tingkat pertama sehingga pelayanan masyarakat pencari keadilan dapat dilakukan secara optimal.
2. Agar Mahkamah Agung RI lebih mencanangkan peningkatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk Pejabat Struktural dan Fungsional untuk lebih

meningkatkan pengalaman dan kompetensi SDM aparatur khususnya kualitas SDM berbasis teknologi informasi.

3. Dalam Hal Sumber Daya Manusia hendaknya Mahkamah Agung RI dapat menambah /memindahkan pegawai yang berada disatuan kerja yang jumlah aparaturnya lebih banyak sehingga Pengadilan Agama Maumere mendapatkan tenaga Pegawai baru untuk mengisi kekosongan jabatan maupun aparatur saat ini.
4. Agar Mahkamah Agung RI dapat menambah alokasi anggaran baik dalam sarana dan prasarana maupun belanja modal di Pengadilan Agama Maumere khususnya sebagai pendukung meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

**LAMPIRAN**

**1. SK. Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2020**



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE  
NOMOR : W23-A9/800 /KP.00.3/SK/10/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN  
PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE  
TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

**MEMUTUSKAN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020 yang efektif dan efisien Maka, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2015 tentang

9. Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;  
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
10. Negara RB. Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman  
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah;  
Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non
11. Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/1/2009 tentang Pedoman  
Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di : Maumere  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2020

**Ketua,**



**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19730804 200112 1 003

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere  
Nomor : W23-A9/ 851/KP.00.3/SK/12/2020  
Tanggal : 28 Desember 2020

Susunan Tim Penyusun Laporan Tahunan  
Pada Pengadilan Agama Maumere  
Tahun 2020

- A. Pengarah : Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.  
(Ketua Pengadilan Agama Maumere)
- B. Ketua Tim Penyusun/Reviu : Jufri Endo, S.H.I
- C. Sekretaris Tim : Muhammad Rizki, S.H
- D. Koordinator Korektor : 1. Suratnah Bao, S.Ag., M.H.  
Anggota : 2. Fauzy Arizona, S.Sy
- E. Kordinator Penyajian data Kepaniteraan : 1. Mustajib, S.H.I  
: 2. Abdullah, S.H., M.H.  
Anggota : 3. Sigit Apriluberta, S.H  
: 4. Hamzah Usman  
: 5. Ika Asti Hana, S.E.
- F. Kordinator Penyajian data Kesekretariatan : 1. Muhammad Rizki, S.H  
Anggota : 2. Muhammad Rizki, S.H  
: 3. Hamzah Usman  
: 4. M. Ikram Muslimin, S.E  
: 5. Saudah Yahya, S.H.I.
- G. Operator Penyusun : 1. M. Ikram Muslimin, S.E.  
: 2. Arif Budi Satriawan, S.ST.

Ditetapkan di : Maumere  
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

**Ketua,**



**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19730804 200112 1 003

- Pelantikan Ketua PA. Maumere (Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.) Oleh Ketua PTA. Kupang



- Silaturahmi Ketua PA. Maumere ke Polres Sikka



- Penyerahan Kontrak Kerja Posakum dengan LBH Surya NTT Oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere



- Ketua PA Maumere Menerima Piagam Penghargaan Peringkat ke 2 Penilaian Kinerja Wilayah PTA Kupang



- Foto Bersama TIM Tim pengawasan dan pembinaan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia

